

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN WAKATOBI



2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAKATOBI**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN WAKATOBI



2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAKATOBI**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN WAKATOBI 2019

ISSN/ISBN : 978-602-6461-44-5

No. Publikasi : 74070.2018

Katalog BPS : 4102004.7407

Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm

Jumlah Halaman : xii + 76 halaman

Naskah :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
BPS Kabupaten Wakatobi

Gambar Kulit oleh :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
BPS Kabupaten Wakatobi

Penerbit :

BPS Kabupaten Wakatobi

Sumber Ilustrasi : freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi. Boleh mengutip dengan menyertakan sumbernya

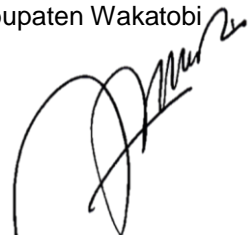
KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wakatobi 2019 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wakatobi yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kabupaten Wakatobi antar waktu. Data yang digunakan berasal dari BPS dan lembaga terkait. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Potensi Desa (Podes), Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), dan Proyeksi Penduduk Indonesia.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan dan untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut tujuh bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, serta Kemiskinan yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Wangi-Wangi, Juli 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Wakatobi



Toweddy Marthinus Layico, S.Si.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab Umum :

Towedy Marthinus Layico, S.Si.

Penanggung Jawab Teknis :

Apri Dian Sulistiana, SE.

Penulis Naskah :

La Ode Misran, S.Tr.Stat.

Pengolah Data :

La Ode Misran, S.Tr.Stat.

Infografis :

Maharani Wahyu Saridewi, S.Tr.Stat.

Gambar Kulit dan Perwajahan Isi :

Maharani Wahyu Saridewi, S.Tr.Stat.

<https://wakatobikab.bps.go.id>

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Tim Penyusun	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	ix
Singkatan dan Akronim	xi
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Kependudukan	7
Bab 3 Kesehatan dan Gizi	19
Bab 4 Pendidikan	35
Bab 5 Ketenagakerjaan	45
Bab 6 Taraf dan Pola Konsumsi	55
Bab 7 Perumahan dan Lingkungan	63
Bab 8 Kemiskinan	71

Daftar Tabel

KEPENDUDUKAN

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Wakatobi, 2015- 2019	10
Tabel 2.2	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Kecamatan, 2019	12
Tabel 2.3	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Wakatobi, 2015-2019	13
Tabel 2.4	Penduduk Kabupaten Wakatobi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur, 2019	13
Tabel 2.5	Komposisi Penduduk (persen) dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Wakatobi, 2015-2019	14

KESEHATAN DAN GIZI

Tabel 3.1	Angka Harapan Hidup (tahun) Kabupaten Wakatobi, 2015-2019	22
Tabel 3.2	Jumlah dan Persentase Ibu Hamil di Kabupaten Wakatobi yang Melakukan Pemeriksaan Antenatal, 2015-2019	26
Tabel 3.3	Rasio Fasilitas dan Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk Kabupaten Wakatobi, 2018 dan 2019	31

PENDIDIKAN

Tabel 4.1	Angka Melek Huruf (persen) Penduduk Kabupaten Wakatobi Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2018 dan 2019	38
Tabel 4.2	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Kabupaten Wakatobi Berusia 15 Tahun ke Atas, 2016-2019	39
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni Formal dan Non Formal (persen) Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Kelamin, 2018 dan 2019	40

Tabel 4.4	Perkembangan Rasio Murid-Sekolah, Rasio Guru-Sekolah, dan Rasio Murid-Guru Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020	43
-----------	---	----

KETENAGAKERJAAN

Tabel 5.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) di Kabupaten Wakatobi, 2015-2019	48
Tabel 5.2	Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin (persen) di Kabupaten Wakatobi, 2018-2019	48
Tabel 5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) di Kabupaten Wakatobi, 2015-2019	50
Tabel 5.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin (persen) di Kabupaten Wakatobi, 2018-2019	50
Tabel 5.5	Persentase Penduduk Kabupaten Wakatobi yang Bekerja (persen), 2018-2019	52
Tabel 5.6	Persentase Pekerja Menurut Jenis Kelamin dan Jam Kerja di Kabupaten Wakatobi (persen), 2019	53

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Tabel 6.1	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Wakatobi (rupiah), 2018-2019	57
Tabel 6.2	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Wakatobi (rupiah), 2019	59
Tabel 6.3	Rata-Rata Konsumsi Kalori (kkal) dan Protein (gram) per Kapita per Hari Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Wakatobi (rupiah), 2019	60

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Tabel 7.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Wakatobi (persen), 2019	67
-----------	--	----

Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Wakatobi (persen), 2018-2019 68

Tabel 7.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal di Kabupaten Wakatobi (persen), 2018-2019 70

KEMISKINAN

Tabel 8.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Wakatobi, 2016-2019 75

Tabel 8.2 Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Wakatobi, 2016-2019 76

<https://wakatobikab.bps.go.id>

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Wakatobi, 2015-2019	10
Gambar 2.2	Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Wakatobi, 2018 dan 2019	16
Gambar 2.3	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Menggunakan Alat KB di Kabupaten Wakatobi, 2015-2019 (persen)	17
Gambar 2.4	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Wakatobi yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2018-2019	18
Gambar 3.1	Angka Kesakitan Penduduk (persen) Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Kelamin, 2018 dan 2019	23
Gambar 3.2	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 – 49 Tahun di Kabupaten Wakatobi yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan, 2019	24
Gambar 3.3	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 – 49 Tahun di Kabupaten Wakatobi yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan, 2018 dan 2019	25
Gambar 3.4	Persentase Balita di Kabupaten Wakatobi yang Pernah Mendapatkan Imunisasi Menurut Jenis Imunisasinya, 2018-2019	27
Gambar 3.5	Persentase Anak Umur 0 – 23 Bulan (Baduta) di Kabupaten Wakatobi yang Pernah Diberi ASI Menurut Jenis Kelamin, 2017 dan 2018	28
Gambar 3.6	Prevalensi Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Bergizi Buruk (per 1.000 kelahiran hidup) di Kabupaten Wakatobi, 2018 dan 2019	29

Gambar 6.1	Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan Kelompok Barang Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Wakatobi (persen), 2016-2019	58
Gambar 8.1	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Wakatobi (rupiah), 2016-2019	74

<https://wakatobikab.bps.go.id>

SINGKATAN DAN AKRONIM

APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	Badan Pusat Statistik
EYS	<i>Estimate of Years Schooling</i>
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MYS	<i>Mean Years Schooling</i>
Podes	Potensi Desa
Pustu	Puskesmas Pembantu
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Sakernas	Survei Ketenagakerjaan Nasional
SD	Sekolah Dasar
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TKK	Tingkat Kesempatan Kerja
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UNFPA	<i>United Nations Population Fund</i>

<https://wakatobikab.bps.go.id>

BAB 1

PENDAHULUAN





1.1 LATAR BELAKANG

Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, dengan cara terpenuhi kebutuhan fisik dan rohaninya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak dasar tersebut akan membentuk watak dan kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif.

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan antara berbagai dimensi kehidupan, sehingga tercipta integrasi berbagai sektor yang pada akhirnya mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Secara tidak langsung, hal tersebut menyiratkan bahwa Indonesia menganut model negara kesejahteraan. Dikemukakan oleh Suharto (2005) dalam Suradi (2007), bahwa Indonesia menganut faham *welfare state* dengan model *participatory welfare state* atau negara kesejahteraan partisipatif. Model ini menekankan bahwa negara tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial. Namun demikian, dalam operasionalnya negara tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya.

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”

Pemerintah saat ini gencar melaksanakan berbagai macam program pembangunan nasional dalam segala bidang. Menurut Todaro dan Smith (2011), salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara adalah laju pertumbuhan ekonomi yang dapat mencerminkan kemampuan pertambahan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Terdapat tiga komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (termasuk semua investasi baru dalam tanah, peralatan fisik, dan sumberdaya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja), pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi.



Monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga program-program pembangunan berikutnya dapat lebih optimal. Tahapan penting dari proses pembangunan yang memerlukan perhatian khusus yakni evaluasi terhadap kinerja pembangunan. Hal ini penting karena keberhasilan suatu pembangunan dapat dilihat berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Untuk memonitor pencapaian yang telah diraih, diperlukan suatu alat ukur yang mampu merangkum dinamika pembangunan dalam kurun waktu tertentu. Alat ukur tersebut biasanya dapat berupa angka-angka yang mampu memberikan gambaran dan mengindikasikan seberapa dekat pencapaian tujuan yang ingin diraih. Indikator yang tepat, akurat, valid, dan reliabel dapat digunakan sebagai alat ukur yang relevan dalam memonitor pencapaian pembangunan sehingga hal-hal sentral yang menjadi titik berat pembangunan dapat lebih difokuskan.

“Keberhasilan suatu pembangunan dapat dilihat berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.”

Buku ini berisi Indikator Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wakatobi. Spektrum pengguna data Indikator Kesejahteraan Rakyat sangat luas, mulai dari pemerintah, akademisi, pengusaha, kalangan internasional, hingga masyarakat umum. Luasnya spektrum pengguna sejalan dengan sifat alamiah data yang memiliki dimensi yang sangat luas. Oleh karena itu, sesuai pengalaman empiris BPS Kabupaten Wakatobi, indikator kesejahteraan rakyat yang merupakan indikator pencapaian kesejahteraan rakyat mencakup: indikator kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, dan kemiskinan. Dengan demikian, kami harapkan buku ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dalam melakukan perencanaan, monitoring, serta evaluasi berbagai program pembangunan kesejahteraan rakyat.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wakatobi 2019 ini adalah untuk merangkum berbagai indikator kesejahteraan rakyat di Kabupaten Wakatobi, melihat perkembangan kesejahteraan rakyat antar waktu secara umum, dan memberikan informasi yang lengkap berupa analisis mendalam kepada pembaca. Analisis ini diharapkan dapat menyajikan data dan informasi mengenai kondisi kesejahteraan rakyat sehingga dapat menjadi acuan dalam masukan pembentukan program pembangunan yang akan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.



1.3 RUANG LINGKUP DAN SUMBER DATA

Analisis indikator kesejahteraan rakyat ini menyajikan data dan informasi pada tahun 2015-2019. Data dan informasi yang disajikan pada analisis ini menggambarkan kondisi dan perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Wakatobi.

Untuk mendukung analisis indikator kesejahteraan rakyat di Kabupaten Wakatobi, berbagai sumber data digunakan. Data utama dalam publikasi ini bersumber dari BPS, yaitu dari hasil Proyeksi Sensus Penduduk, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Potensi Desa (Podes), serta data sektoral yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga lain.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wakatobi 2019 ini terdiri dari 8 Bab, yaitu:

1. Bab 1 (Pendahuluan) yang membahas latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan sumber data yang digunakan dalam analisis, dan sistematika penulisan.
2. Bab 2 (Kependudukan) membahas tentang perkembangan kesejahteraan rakyat secara umum dalam hal kependudukan.
3. Bab 3 (Kesehatan dan Gizi) membahas tentang perkembangan kesejahteraan rakyat secara umum dalam hal kesehatan dan gizi.
4. Bab 4 (Pendidikan) membahas tentang perkembangan kesejahteraan rakyat secara umum dalam hal pendidikan.
5. Bab 5 (Ketenagakerjaan) membahas tentang perkembangan kesejahteraan rakyat secara umum dalam hal ketenagakerjaan.
6. Bab 6 (Tarf dan Pola Konsumsi) membahas tentang perkembangan kesejahteraan rakyat secara umum dalam hal taraf dan pola konsumsi masyarakat.
7. Bab 7 (Perumahan dan Lingkungan) membahas tentang perkembangan kesejahteraan rakyat secara umum dalam hal perumahan dan lingkungan tempat tinggal masyarakat.
8. Bab 8 (Kemiskinan) membahas tentang perkembangan kesejahteraan rakyat secara umum dalam hal kemiskinan.



<https://wakatobikab.bps.go.id>

BAB 2

KEPENDUDUKAN

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2019



95 892

(Hasil Proyeksi Penduduk)



LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

0,16%

Periode 2015-2019

Penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai **60,65%** dari total jumlah penduduk, dengan rasio ketergantungan sebesar **64,88**.

2 orang penduduk usia produktif pada tahun 2018 diprediksi menanggung 1 orang usia non produktif.





Pembahasan terkait isu kependudukan tak pernah lepas dan selalu berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Sumber daya manusia memegang peran penting dalam pembangunan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan demi kesejahteraan bersama secara berkelanjutan. Namun di sisi lain, penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan apabila pengendalian pertumbuhan penduduk tidak dibarengi dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang layak dan berkelanjutan.

Pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan meningkatkan angka kesakitan dan kematian penduduk. Ketersediaan pemukiman yang tidak memadai dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar dan kumuh serta gelandangan dan anak jalanan. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat fasilitas kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan fasilitas pendidikan yang terbatas.

“Upaya pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk yang kurang baik dan tidak merata dapat menimbulkan masalah di masa mendatang”

Data dan informasi kependudukan merupakan data strategis yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Data penduduk pada masa lampau dan saat ini bermanfaat untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Proyeksi jumlah penduduk pada masa mendatang merupakan sumber yang sangat penting sebagai dasar perencanaan ke depan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Jumlah penduduk di Kabupaten Wakatobi sendiri masih tergolong rendah, tercatat pada tahun 2019 berjumlah sekitar 95.892 orang atau hanya 3,55 persen dari total penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 2,704 juta orang. Selanjutnya, proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas, dan UNFPA menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Wakatobi selalu meningkat dari tahun ke tahun (Tabel 1).



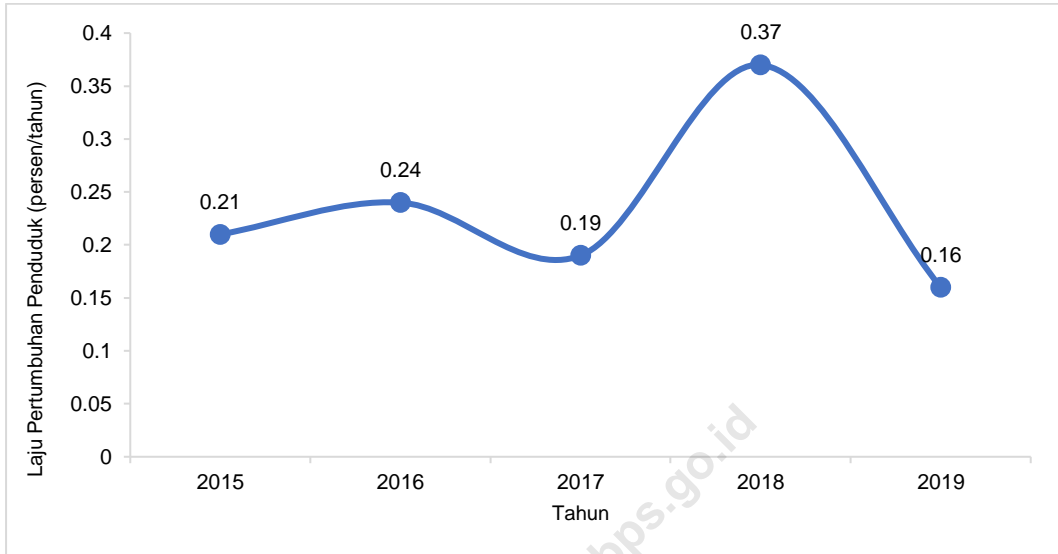
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Wakatobi, 2015-2019

Indikator Kependudukan	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk (orang)	94.985	95.209	95.386	95.737	95.892
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,21	0,24	0,19	0,37	0,16

Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Wakatobi cenderung diikuti laju pertumbuhan penduduk yang fluktuatif pada rentang rentang 0,20 hingga 0,40 persen. Pada kurun waktu 2015-2018, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wakatobi cenderung melambat, namun pada tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wakatobi menunjukkan tren positif (terjadi peningkatan), meskipun sempat melambat di tahun 2017. Namun laju pertumbuhan penduduk mengalami perlambatan yang cukup besar dari yang awalnya 0,37 persen di tahun 2018 menjadi 0,16 persen di tahun 2019. Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini terjadi karena terjadi penurunan jumlah kelahiran sebesar 4,88 persen di tahun 2019 (berdasarkan data Dinkes) dan kemungkinan migrasi keluar Kabupaten Wakatobi lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Tersedianya lapangan pekerjaan serta infrastruktur di daerah lain yang lebih baik kemungkinan menjadi faktor pendorong penduduk melakukan migrasi keluar Kabupaten Wakatobi.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Wakatobi memiliki laju pertumbuhan penduduk yang paling rendah. Dalam isu kependudukan, pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dapat memberikan dampak negatif terkait ledakan penduduk, namun di sisi lain pertumbuhan penduduk yang terlalu rendah juga perlu menjadi perhatian. Pertumbuhan penduduk yang terlalu rendah dapat menyebabkan sedikitnya penduduk usia muda dibandingkan penduduk usia tua yang dapat berakibat pada peningkatan dana pensiun/hari tua dan berkurangnya angkatan kerja muda. Hal ini berkaitan dengan optimal/tidaknya pemanfaatan sumber daya alam yang dibutuhkan dalam pembangunan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah tepat dalam upaya pengendalian penduduk agar jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wakatobi menjadi potensi tersendiri bagi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Wakatobi.

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Penduduk Kabupaten Wakatobi, 2015-2019


Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik

Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk juga terjadi di Kabupaten Wakatobi. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara di wilayah lain masih ada yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini berpengaruh pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Selama ini persebaran penduduk Kabupaten Wakatobi terkonsentrasi pada wilayah ibu kota Kabupaten, yakni di Pulau Wangi-Wangi (Tabel 2.2). Jika di tahun 2018 penduduk terbanyak ada di Kecamatan Wangi-Wangi (28,12 persen), maka di tahun 2019 jumlah penduduk terbanyak mendiami Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (27,44). Semakin jauh kecamatannya dari ibu kota kabupaten, semakin sedikit penduduk yang mendiami kecamatan tersebut. Jumlah penduduk terendah mendiami kecamatan Togo Binongko (4,98 persen) yang merupakan kecamatan terjauh dari ibu kota Kabupaten Wakatobi. Meskipun Kecamatan Wangi-Wangi Selatan memiliki persebaran penduduk terbanyak di Kabupaten Wakatobi, namun Kecamatan Wangi-Wangi memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Wakatobi sebesar 422 orang/km². Sementara itu, kepadatan



penduduk terendah ada di Kecamatan Binongko (151 orang/km²) dan Binongko (130 orang/km²).

Tabel 2.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Kecamatan, 2019

Kecamatan	Distribusi Penduduk (persen)	Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
(1)	(2)	(3)
Binongko	9,01	151
Togo Binongko	4,98	130
Tomia	7,15	250
Tomia Timur	8,39	209
Kaledupa	10,72	349
Kaledupa Selatan	7,48	153
Wangi-Wangi	24,84	422
Wangi-Wangi Selatan	27,44	254
Kabupaten Wakatobi	100	202

Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik

Komposisi Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, dan Angka Beban Ketergantungan

Aspek lain dari analisis data penduduk adalah rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan pada suatu wilayah tertentu dan waktu tertentu. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan di masa lampau yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

**Tabel 2.3 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Wakatobi, 2015-2019**

Indikator Kependudukan	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rasio Jenis Kelamin	92,38	92,46	92,27	92,61	92,59

Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik

Bila dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin Kabupaten Wakatobi, rasio jenis kelamin Kabupaten Wakatobi pada tahun 2019 yaitu sebesar 92,59. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 92 hingga 93 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Selanjutnya, apabila dilihat lebih mendalam hingga ke kelompok umur tertentu, terdapat pola rasio jenis kelamin yang berbeda dari rasio jenis kelamin untuk seluruh penduduk Kabupaten Wakatobi (Tabel 2.4).

Tabel 2.4 Penduduk Kabupaten Wakatobi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur, 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 14 tahun	15.385	14.962	102,83
15 – 64 tahun	27.592	30.566	90,27
65+ tahun	3.116	4.271	72,96
Kabupaten Wakatobi	46.093	49.799	92,56

Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik

Pada kelompok umur 0 – 14 tahun, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Wakatobi tercatat lebih besar dari 100, yakni 102,83 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, dimana setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 hingga 103 penduduk laki-laki pada kelompok umur 0 – 14 tahun. Berbeda dari kelompok usia 0 – 14 tahun, kelompok usia 15 – 64 tahun dan 65 tahun ke atas memiliki nilai rasio jenis kelamin kurang dari 100 dan berangsur menurun



yang artinya semakin tinggi usianya, jumlah penduduk laki-laki berangsur menjadi lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun kelahiran laki-laki tinggi, namun angka harapan hidup laki-laki masih tergolong rendah. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, angka harapan hidup penduduk laki-laki di Provinsi Sulawesi pada tahun 2018 hanya 68,83 tahun, sementara angka harapan hidup penduduk perempuan Sulawesi Tenggara mencapai 72,71 tahun. Dugaan lain terhadap fenomena ini adalah karena penduduk laki-laki di Kabupaten Wakatobi yang mayoritas bekerja sebagai nelayan dan pedagang lebih sering merantau ke luar Kabupaten Wakatobi dibandingkan penduduk perempuan

Analisis kependudukan berdasarkan umur dapat dilihat dari komposisinya (Tabel 2.5). Selama tahun 2015 – 2019, penduduk Kabupaten Wakatobi didominasi oleh penduduk usia produktif (15 – 64 tahun). Komposisi penduduk usia produktif terus meningkat dan mencapai 60,65 persen pada tahun 2019. Hal ini juga ditunjukkan dari angka beban ketergantungan yang terus menurun dan mencapai 64,88 persen pada tahun 2019, yang berarti 100 penduduk usia produktif harus menanggung 64 hingga 65 penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi persentasenya menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, begitu juga sebaliknya. Fakta ini merupakan kabar baik bagi Kabupaten Wakatobi, karena dominasi penduduk usia produktif dapat mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Wakatobi.

Tabel 2.5 Komposisi Penduduk (persen) dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Wakatobi, 2015-2019

Komposisi Penduduk	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0 – 14 tahun	32,83	32,53	32,23	31,95	31,65
15 – 64 tahun	60,08	60,25	60,40	60,53	60,65
65+ tahun	7,09	7,22	7,36	7,52	7,70
Angka Beban Ketergantungan (persen)	66,45	65,98	65,56	65,21	64,88

Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik



Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, rasio ketergantungan yang cenderung terus menurun diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020 – 2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Perlu diperhatikan bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja, tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial-ekonomi dan politik jika di antara mereka banyak yang tidak bekerja. Oleh karena itu, pemerintah harus memanfaatkan kesempatan ini dengan tepat. Lapangan pekerjaan atau kegiatan perekonomian harus mampu menyerap tenaga yang ada.

“Penduduk usia produktif di Kabupaten Wakatobi merupakan potensi bagi keberlanjutan pembangunan Kabupaten Wakatobi di masa mendatang.”

Fertilitas

Kondisi kependudukan tidak terlepas dari fenomena fertilitas dan mortalitas pada suatu wilayah. Fertilitas itu sendiri erat kaitannya dengan usia perkawinan pertama bagi perempuan. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang perempuan dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang perempuan, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia perempuan saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

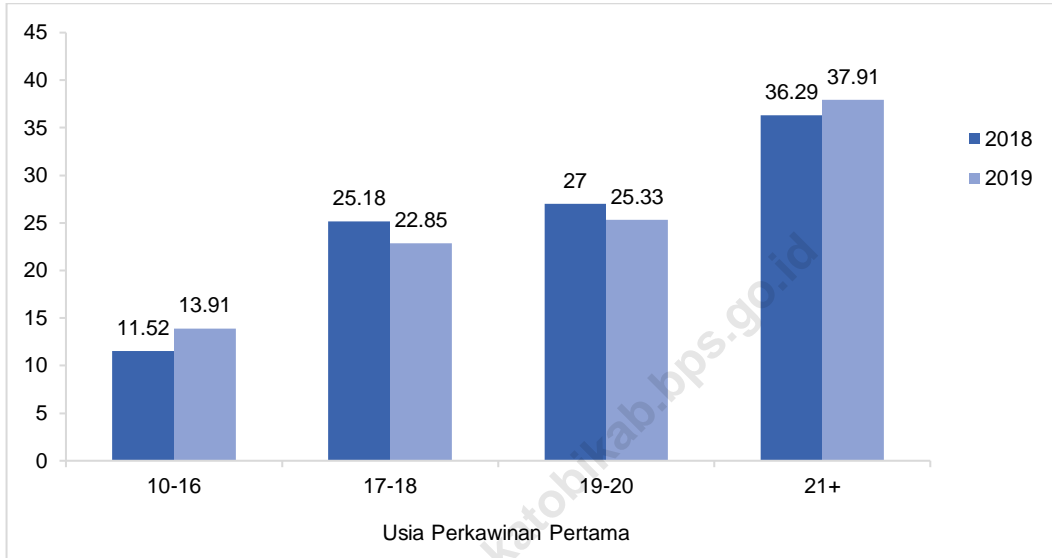
Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang perempuan untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1, syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, usia minimal untuk menikah yaitu sudah berusia 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21 – 25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2019 (kondisi Maret 2019), dari seluruh perempuan di Kabupaten Wakatobi yang pernah menikah, sebesar 37,91 persen menikah pada usia 21 tahun ke atas. Angka tersebut meningkat bila dibandingkan kondisi tahun 2018 (Gambar 2.2). Persentase tertinggi kedua adalah perempuan pernah kawin dengan usia perkawinan pertama 19 – 20 tahun, yaitu sebesar 25,33 persen. Sementara itu, banyaknya wanita yang pernah kawin di usia 10-16 tahun hanya sebanyak 13,91 persen di tahun 2019. Distribusi ini mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun 2018.



Perkawinan usia 17-20 tahun mengalami penurunan, sedangkan perkawinan usia 10-16 tahun serta usia 21 tahun ke atas mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 2.2 Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Wakatobi, 2018 dan 2019



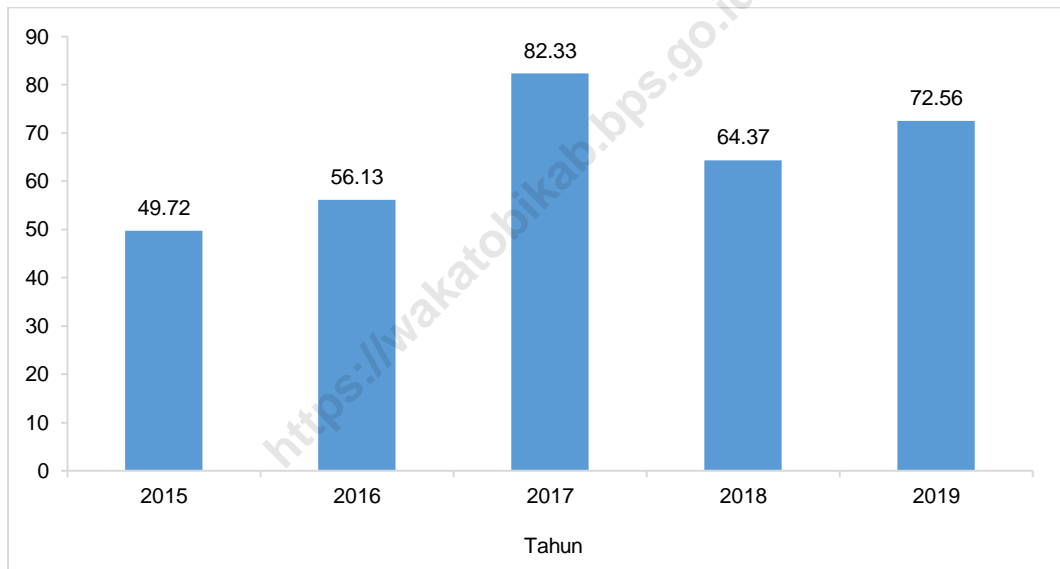
Sumber : Susenas Kor, 2018-2019, Badan Pusat Statistik

Peningkatan jumlah perempuan yang menikah di usia 10-16 tahun mengindikasikan adanya kecenderungan bertambahnya perempuan yang memutuskan untuk memasuki masa reproduksi pada usia muda. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dikarenakan pernikahan usia muda dapat mendorong adanya kehamilan pada wanita muda. Tentu saja, hal tersebut dapat berisiko untuk kesehatan dan keselamatan baik bagi sang anak maupun sang ibu. Terkait dengan hal ini, maka pemerintah berperan serta dalam memberikan penyuluhan pada remaja dan orang tua mengenai pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak sesuai tahapan usianya, membantu remaja untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi juga alat kontrasepsi, serta menilai kemampuan orang tua berusia muda dalam mengasuh anak untuk mencegah terjadinya penelantaran atau perlakuan salah pada anak.

“Perkawinan dini berisiko untuk kesehatan dan keselamatan baik bagi sang anak maupun sang ibu khususnya terkait kesiapan organ reproduksi perempuan di usia muda.”

Fenomena fertilitas ini juga sangat berhubungan dengan program pembatasan anak dan jarak kelahiran dalam keluarga. Program tersebut dapat dilihat dari penggunaan alat KB oleh pasangan. Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Wakatobi, persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat KB mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 64,37 persen pada tahun 2018 menjadi 72,56 persen di tahun 2019. Peningkatan angka penggunaan kontrasepsi menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai manfaat dari kontrasepsi dalam mengatur dan mengendalikan jumlah kelahiran yang dapat berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga.

Gambar 2.3 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Menggunakan Alat KB di Kabupaten Wakatobi, 2015-2019 (persen)



Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka, Badan Pusat Statistik

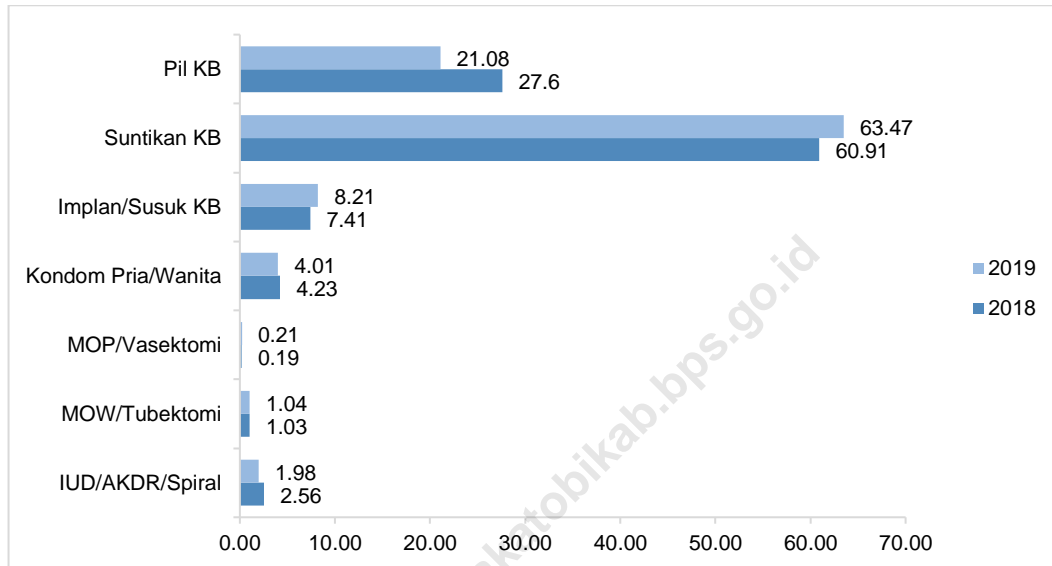
Dari sekian jenis alat/cara KB, yang paling banyak diminati adalah alat suntikan KB (Gambar 2.4). Penggunaannya mengalami peningkatan dari 60,91 persen pada tahun 2018 menjadi 63,47 persen pada tahun 2019. Jenis alat/cara KB lainnya yang penggunaannya juga mengalami peningkatan adalah implant/susuk KB yang meningkat dari 7,41 persen di tahun 2018 menjadi 8,21 persen di tahun 2019. Sementara Pil KB memiliki jumlah pengguna terbanyak setelah suntikan KB, namun penggunaannya mengalami penurunan di tahun 2019.

Kondisi kependudukan Indonesia ini harus selalu mendapat perhatian pemerintah, terutama pada fertilitas dan program yang mendukung fertilitas. Hal ini dikarenakan



fertilitas dapat menjadi ukuran terjaminnya kondisi kesehatan masyarakat yang berujung pada tingkat kesejahteraan. Selain itu, fertilitas merupakan salah satu faktor pendorong dalam pertumbuhan penduduk.

Gambar 2.4 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Wakatobi yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2018-2019



Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka, Badan Pusat Statistik

BAB 3

KESEHATAN DAN GIZI

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah memiliki sasaran utama yaitu menurunkan prevalensi gizi buruk, menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

ANGKA
HARAPAN HIDUP

70,13



TERDAPAT

39

BAYI BERAT BADAN
LAHIR RENDAH

per 1000 kelahiran hidup

TERDAPAT

9

BAYI DENGAN GIZI BURUK

per 1000 kelahiran hidup

Pada Tahun 2019,

10,28%

Penduduk Wakatobi
mengalami keluhan
kesehatan yang
mengakibatkan
terganggunya
kegiatan sehari-hari





Seluruh warga negara di Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Hal tersebut selain dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga dipaparkan pada Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009. Pada UU RI No. 36 tahun 2009 juga dituliskan secara rinci dan lengkap tentang pengertian tenaga kesehatan, tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan dan pemerataan tenaga kesehatan, serta upaya pengawasan maupun pembinaan atas hal tersebut.

Derajat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Derajat kesehatan masyarakat dapat dicerminkan melalui beberapa indikator terpilih, seperti angka harapan hidup, angka kesakitan, angka kematian, dan status gizi. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

“Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.”

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain angka harapan hidup, angka kesakitan, prevalensi balita kurang gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

Status Kesehatan Masyarakat

Status kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat terutama dalam upaya preventif/pencegahan. Pola hidup tersebut juga sangat bergantung pada



perilaku dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pola hidup mengalami perubahan jika pendapatan cenderung tetap atau mengalami penurunan, di sisi lain pemenuhan kebutuhan semakin lama semakin sulit dengan kenaikan harga secara terus menerus. Sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan terjadinya pergeseran pola makan dan aktivitas fisik yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesehatan

Status kesehatan penduduk dapat tercermin dari angka Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur X, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Status kesehatan penduduk selama 2015-2019 terlihat membaik sejalan dengan meningkatnya angka harapan hidup seperti yang ditunjukkan pada data Tabel 3.1. Pada tahun 2019, angka harapan hidup tercatat 70,13 tahun. Artinya, bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2019 akan dapat hidup sampai 70 atau 71 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini menyebabkan bertambahnya populasi penduduk lansia. Peningkatan angka harapan hidup bisa berarti baik dan buruk. Baik karena angka ini menunjukkan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan peningkatan kesehatan lingkungan. Namun bisa berarti buruk karena meningkatkan jumlah masyarakat yang rentan terhadap berbagai penyakit karena makin besar jumlah lansia.

Tabel 3.1 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Wakatobi, 2015-2019

Derajat Kesehatan	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup (tahun)	69,49	69,54	69,59	69,85	70,13

Sumber : Susenas Kor, Badan Pusat Statistik

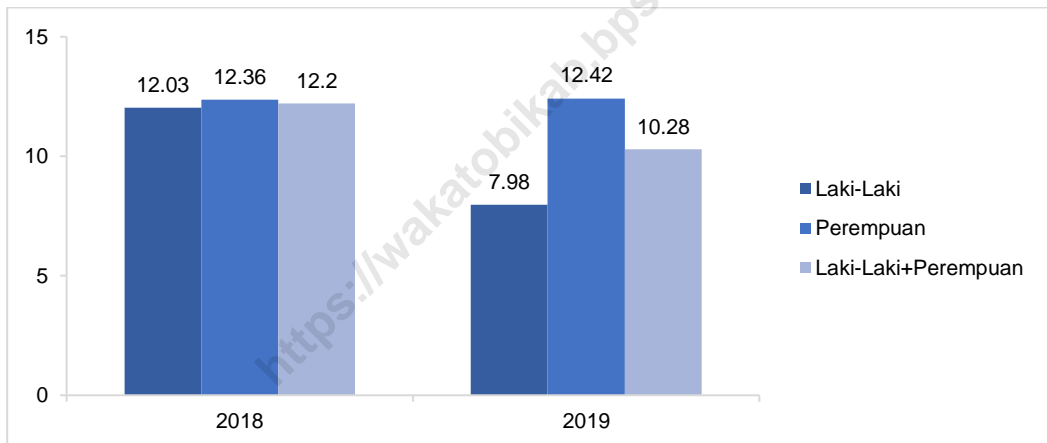
Kemudian, status kesehatan penduduk juga tercermin dari angka kesakitan (morbiditas). Angka kesakitan didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Angka kesakitan Kabupaten Wakatobi tercatat menurun dari 12,20 persen di tahun 2018 menjadi 10,28 persen di tahun 2019 (Gambar 3.1). Penurunan angka kesakitan tentunya menjadi salah satu pendorong meningkatnya angka harapan hidup di tahun 2019, mengingat gangguan kesehatan yang mengganggu aktivitas sebagai salah satu penyebab kematian.

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, angka kesakitan penduduk laki-laki pada tahun 2019 sebesar 7,98 persen, mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan

angka kesakitan 2018 yang sebesar 12,03 persen. Sementara itu, angka kesakitan penduduk perempuan di tahun 2019 sebesar 12,42 persen, sedikit meningkat dibanding tahun 2018. Dengan demikian, angka kesakitan penduduk perempuan di tahun 2019 jauh lebih tinggi dibanding angka kesakitan laki-laki.

Secara umum, semakin sedikit penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, berarti semakin tinggi derajat kesehatan di Kabupaten Wakatobi dan menunjukkan angka kesakitan yang rendah di wilayah tersebut (penduduknya sedikit yang mengalami sakit). Angka kesakitan secara total yang masih diatas 10 persen menunjukkan pentingnya peninjauan dan evaluasi kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Wakatobi, serta pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan yang dibutuhkan.

Gambar 3.1 Angka Kesakitan Penduduk (Persen) Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Kelamin, 2018 dan 2019



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat (Seri 2018 dan 2019), Badan Pusat Statistik

Kesehatan Ibu dan Anak

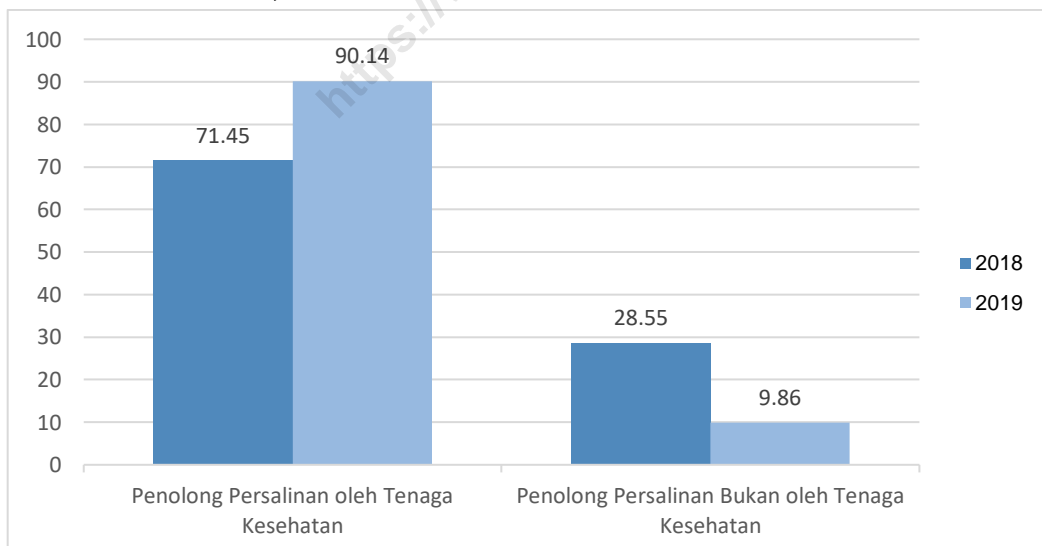
Kesehatan ibu merupakan salah satu persoalan pembangunan di Indonesia yang masih terus bergulir. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan ibu ditengarai menjadi penyebab utama masih tingginya angka kematian ibu. Pelayanan kesehatan tersebut dapat berupa akses terhadap tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan kualitas layanan kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan



2015-2019 telah ditetapkan dalam Perpres No. 5 tahun 2010 yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Angka kematian ibu erat kaitannya dengan proses persalinan, apakah ditolong oleh tenaga kesehatan atau tidak. Yang dimaksud tenaga kesehatan di sini yaitu dokter kandungan, dokter umum, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Pada tahun 2019 tercatat persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis (yang dilihat dari persentase perempuan pernah kawin berumur 15 – 49 tahun yang pernah melahirkan dengan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan) sebesar 90,14 persen (Gambar 3.2). Artinya, dari 100 orang perempuan yang melakukan persalinan, dapat dikatakan bahwa 90 sampai 91 orang melahirkan dengan penolong persalinan dari tenaga kesehatan. Angka tersebut meningkat cukup jauh bila dibandingkan kondisi 2018 sebesar 71,45 persen. Dengan kata lain, lebih dari separuh dari ibu melahirkan di Kabupaten Wakatobi telah ditolong oleh tenaga kesehatan. Peningkatan persentase persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan merupakan salah satu indikasi meningkatnya kesadaran para ibu hamil untuk menjaga kesehatan dirinya keselamatan calon bayi yang akan dilahirkan selama persalinan.

Gambar 3.2 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 – 49 Tahun di Kabupaten Wakatobi yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan, 2018 dan 2019

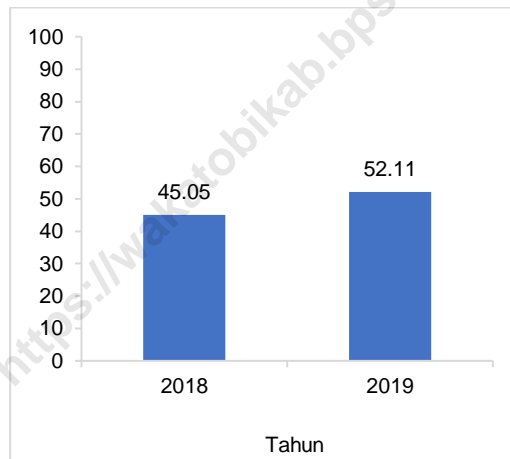


Sumber : Susenas Kor 2018-2019, Badan Pusat Statistik

Pentingnya ibu melahirkan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan juga perlu didukung dengan melahirkan di fasilitas kesehatan seperti klinik/praktek dokter, rumah sakit/rumah sakit bersalin, atau puskesmas/polindes/pustu, bukan di rumah atau lainnya. Ketika proses persalinan, perempuan berada pada posisi antara hidup dan mati. Oleh karenanya, saat persalinan merupakan saat-saat yang rawan sehingga membutuhkan peralatan medis dan tenaga medis yang memadai. Semakin lengkap alat medis dan tenaga medis yang tersedia di tempat melahirkan maka semakin besar peluang untuk ibu dan anak lahir selamat.

“Kematian bayi lebih rentan terjadi pada ibu yang dalam proses persalinannya tidak ditolong oleh tenaga kesehatan.”

Gambar 3.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 – 49 Tahun di Kabupaten Wakatobi yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan, 2018 dan 2019



Sumber : Susenas Kor 2018-2019, Badan Pusat Statistik

Persentase perempuan pernah kawin berumur 15 – 49 tahun yang pernah melahirkan di fasilitas kesehatan tercatat sebanyak 52,11 persen pada tahun 2019. Sementara sisanya atau lebih dari separuhnya melahirkan di rumah. Hal ini mengindikasikan masih banyaknya perempuan yang melakukan persalinan bukan di fasilitas kesehatan. Meskipun demikian, jumlah ini tercatat meningkat dibandingkan tahun lalu dimana hanya 45,05 persen ibu hamil yang melakukan persalinan melahirkan di fasilitas kesehatan. Masih rendahnya angka persalinan di fasilitas kesehatan diduga karena faktor pembiayaan untuk persalinan, serta belum tersedianya sarana transportasi yang siap siaga, terutama di daerah perdesaan atau daerah yang jauh dari unit fasilitas kesehatan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut.



Meskipun angka persalinan dengan pertolongan tenaga medis dan persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan terus meningkat, namun rupanya angka persalinan dengan pertolongan oleh bukan tenaga medis dan angka persalinan yang dilakukan bukan di fasilitas kesehatan masih cukup tinggi, yaitu hampir menyentuh angka 10 persen (untuk persalinan dengan bantuan bukan dari tenaga medis) dan mendekati angka 50 persen (untuk persalinan yang dilakukan bukan di fasilitas kesehatan). Perlu diperhatikan bahwa ibu yang melahirkan tanpa bantuan tenaga kesehatan, selain berdampak pada kesehatan ibu, juga dapat berakibat buruk bagi bayinya. Sehingga tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang memadai serta pentingnya sosialisasi kesehatan ibu dan anak perlu diperhatikan instansi terkait agar meningkatkan kesadaran pada masyarakat Wakatobi akan hal ini.

Mengingat betapa pentingnya proses persalinan terhadap kelangsungan hidup ibu dan bayi, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 ayat 1 yang berbunyi "Persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan". Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan sarana dan prasarana yang memadai dan didukung tenaga kesehatan berkualitas dapat menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Hal ini disebabkan kematian ibu dan bayi banyak disebabkan keterlambatan penanganan pada saat persalinan, yang sebenarnya dapat diminimalisasi dengan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

Setelah bayi berhasil dilahirkan dengan selamat, rendahnya tingkat kesadaran ibu untuk menjalani pemeriksaan antenatal (sebelum kelahiran) juga menjadi salah satu faktor yang mendorong kematian ibu dan bayi. Kurangnya pemeriksaan dini saat kehamilan dan menjelang kelahiran mengakibatkan sulitnya tenaga kesehatan untuk mendeteksi dini apabila ada komplikasi dalam kehamilan. Pemeriksaan antenatal merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Oleh karena itu, pemeriksaan antenatal secara rutin dianggap sebagai salah satu upaya pencegahan kematian ibu dan bayi akibat kehamilan dan kelahiran. Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan, yaitu 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama (K1), 1 kali pemeriksaan pada trimester kedua (K2), dan 2 kali pemeriksaan pada trimester ketiga (K3 dan K4).



Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Ibu Hamil di Kabupaten Wakatobi yang Melakukan Pemeriksaan Antenatal, 2015-2019

Indikator Pemeriksaan Antenatal	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Ibu Hamil (orang)	2.091	2.087	2.336	1.925	2.199
Melakukan Kunjungan K1 (persen)	92,83	91,81	86,22	100,00	66,89
Melakukan Kunjungan K4 (persen)	83,41	82,46	76,28	94,81	86,58
Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (persen)	-	-	-	-	16,01

Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka, Badan Pusat Statistik

Dari seluruh ibu hamil yang tercatat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi pada tahun 2019, sekitar 66,89 persen telah melakukan kunjungan K1 pada pemeriksaan antenatal di trimester pertama. Jumlah tersebut meningkat pada akhir trimester ketiga (K4), dimana ibu hamil yang melakukan pemeriksaan antenatal meningkat menjadi 86,58 persen. Dengan kata lain, masih ada sebanyak 13,42 persen di antaranya yang tidak melakukan pemeriksaan hingga kunjungan K4.

Secara umum, kesadaran ibu hamil di Kabupaten Wakatobi terhadap pentingnya pemeriksaan antenatal di tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan 2018 (Tabel 3.2). Selain itu, dalam lima tahun terakhir, di tahun 2019 pertama kali tercatat terdapat ibu hamil di Kabupaten Wakatobi yang mengalami kekurangan energi kronis, yaitu sebanyak 16,01 persen.

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa pemeriksaan antenatal dapat mengurangi risiko kelahiran mati dan komplikasi kehamilan, serta memberi perempuan pengalaman kehamilan yang positif. Dengan demikian, sosialisasi oleh pemerintah Kabupaten Wakatobi kepada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan antenatal masih perlu ditingkatkan usahanya, mengingat persentase ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan pada trimester pertama yang masih cukup tinggi (diatas 30 persen) dan masih banyaknya ibu hamil yang kekurangan energi (diatas 10 persen).

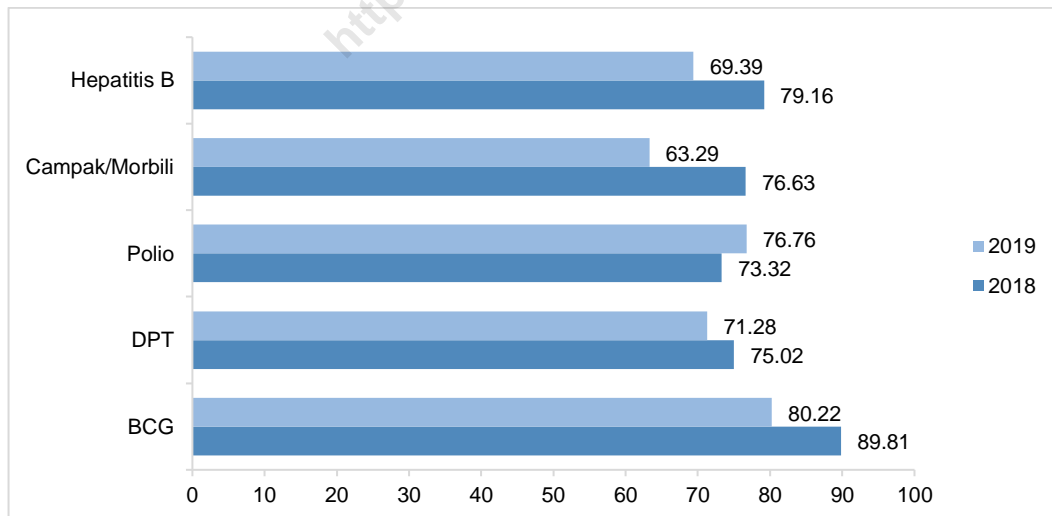


Dengan berfokus pada pengalaman kehamilan yang positif, pemeriksaan antenatal berupaya memastikan tidak hanya kehamilan yang sehat untuk ibu dan bayi, tetapi juga transisi yang efektif ke persalinan dan melahirkan yang positif dan pada akhirnya ke pengalaman positif menjadi ibu.

Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Dari sisi anak, upaya pembangunan kesehatan dimulai dari peningkatan imunitas dan gizi balita. Imunitas dan gizi merupakan komponen penting untuk mendukung tumbuh kembang dan kesehatan anak. Imunitas dan gizi balita yang baik dan diperhatikan sejak dalam kandungan berperan dalam mengurangi angka kematian bayi dan balita. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan imunitas dan gizi balita adalah dengan menyediakan fasilitas posyandu untuk program imunisasi dasar gratis. Imunisasi merupakan upaya perlindungan terhadap penyakit menular yang dapat dicegah, seperti Tuberkulosis, Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, Polio dan Campak. Program imunisasi di Indonesia mewajibkan setiap bayi usia 0-11 bulan memperoleh imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-Hib, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis campak. Menginjak usia 12 bulan, seharusnya seorang balita telah memenuhi imunisasi dasar lengkap

Gambar 3.4 Persentase Balita di Kabupaten Wakatobi yang Pernah Mendapatkan Imunisasi Menurut Jenis Imunisasinya, 2018-2019



Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka, Badan Pusat Statistik



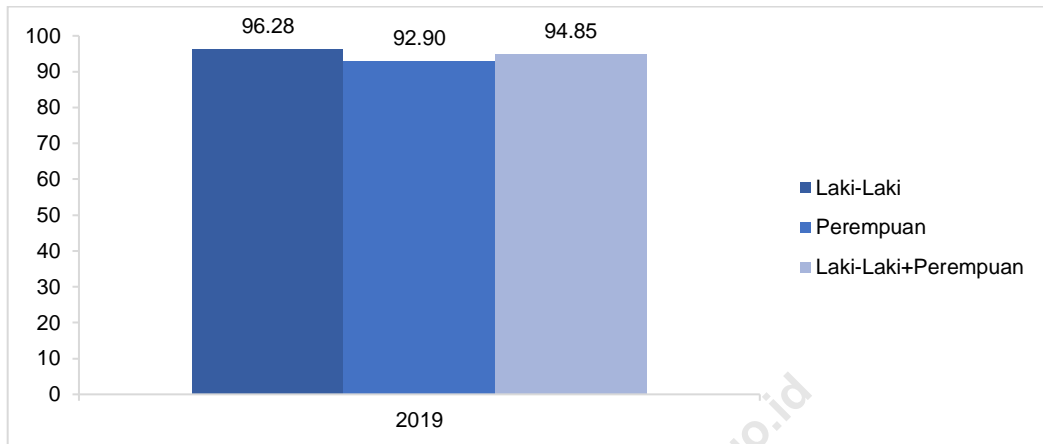
Secara umum, di tahun 2019 balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Wakatobi sudah lebih dari 60 persen. Dari keseluruhan imunisasi dasar lengkap yang diberikan ke balita (Gambar3.4), hanya pemberian imunisasi polio yang mengalami peningkatan, dari yang sebelumnya 73,32 persen di tahun 2018 naik menjadi 76,76 persen di tahun 2019. Banyaknya balita yang melakukan imunisasi BCG mengalami penurunan dari yang sebelumnya 89,81 persen pada tahun 2018 menjadi 80,22 persen di tahun 2019. Imunisasi Campak juga mengalami penurunan dari yang sebelumnya sebanyak 76,63 persen pada tahun 2018, turun menjadi 63,29 persen di tahun 2019. Banyaknya balita melakukan imunisasi DPT dan Hepatitis B juga tercatat mengalami penurunan di tahun 2019. Meskipun adanya sosialisasi dan program pemberian vaksin secara masif, namun banyaknya anak yang mengalami efek samping setelah imunisasi, isu seputar kehalalan vaksin, serta banyaknya yang tidak lapor memengaruhi turunnya cakupan imunisasi.

Kementerian Kesehatan dalam Renstra 2015-2019 menyebutkan bahwa target persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 93 persen. Dengan demikian, persentase imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Wakatobi masih dibawah target Kementrian Kesehatan. Langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan cakupan imunisasi antara lain melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap manfaat imunisasi, melakukan sosialisasi menanggapi isu-isu negatif seputar imunisasi, serta dukungan dari pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan. Informasi yang benar tentang imunisasi wajib diterima oleh para orang tua sehingga imunisasi akan menjadi gerakan masyarakat yang dapat meningkatkan derajat kesehatan.

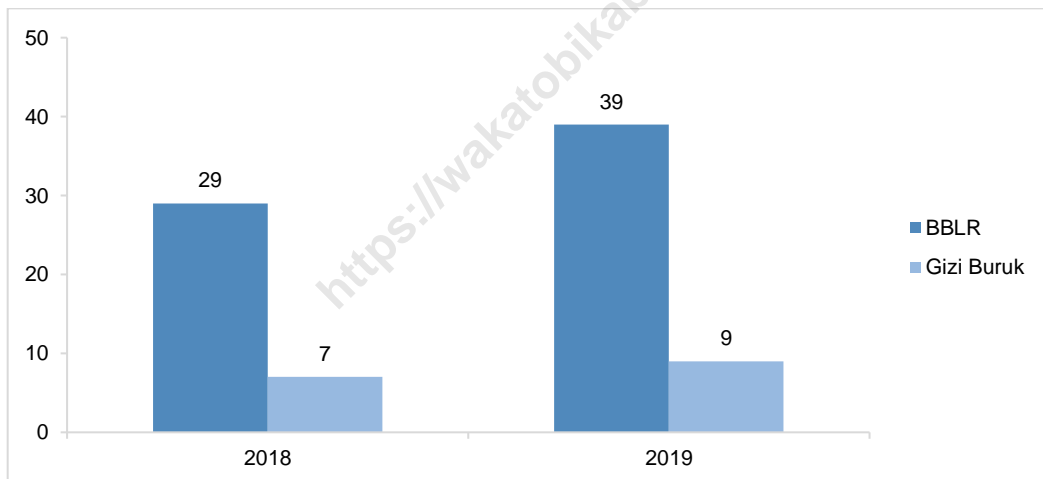
Selain imunisasi, pemberian ASI eksklusif juga penting dalam meningkatkan imunitas dan gizi pada bayi. ASI merupakan gizi terbaik untuk bayi karena mengandung kolostrum yang kaya akan antibodi dan mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan pembunuh kuman dalam jumlah tinggi sehingga pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi risiko kematian pada bayi. Secara psikologis, pemberian ASI juga dapat meningkatkan kasih sayang serta kedekatan antara ibu dan anak. *World Health Organization (WHO)* menyarankan pemberian ASI dilakukan hingga bayi berusia 2 tahun (Baduta). Pemberian ASI sampai usia 2 tahun atau lebih membantu matangnya sistem kekebalan tubuh, perkembangan otak, sistem pencernaan dan lainnya. Berdasarkan Gambar 3.5, pemberian ASI kepada bayi berumur 0-23 bulan (baduta) di Kabupaten Wakatobi sudah cukup tinggi di tahun 2019, yaitu sebanyak 94,85 persen.



Gambar 3.5 Persentase Anak Umur 0 – 23 Bulan (Baduta) di Kabupaten Wakatobi yang Pernah Diberi ASI Menurut Jenis Kelamin, 2019



Gambar 3.6 Prevalensi Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Bergizi Buruk (per 1.000 kelahiran hidup) di Kabupaten Wakatobi, 2018 dan 2019



Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka, Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, program kecukupan gizi juga sangat penting bagi balita. Salah satu persoalan kesehatan yang mengundang cukup perhatian yaitu seputar status gizi. Prevalensi status gizi balita perlu dipandang sebagai tantangan pembangunan karena menentukan nasib generasi masa depan. Potret gambaran status gizi di Indonesia dapat tercermin dari prevalensi gizi buruk dan gizi kurang (*underweight*) pada anak usia di bawah lima tahun atau balita, prevalensi pendek dan sangat pendek (*stunting*) pada anak usia di bawah dua tahun atau baduta, serta prevalensi kurus dan sangat kurus (*wasting*). Gizi



buruk erat kaitannya dengan kekurangan energi dan protein dalam jangka waktu yang lama akibat asupan gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk antara lain asupan gizi yang kurang baik, pemahaman mengenai makanan yang aman untuk dimakan, penyakit menular, lingkungan, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan pola asuh (www.depkes.go.id).

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi memperlihatkan bahwa prevalensi bayi dengan berat badan lahir rendah di Kabupaten Wakatobi mengalami peningkatan, yaitu dari 29 kasus per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2018 menjadi 39 kasus per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2019 (Gambar 3.6). Demikian halnya dengan prevalensi bayi bergizi buruk yang mengalami peningkatan dari 7 kasus per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2018 menjadi 9 kasus per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2019. Meningkatnya prevalensi bayi BBLR dan bayi gizi buruk menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Wakatobi mengingat pengentasan gizi buruk dan kelaparan adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Ketersediaan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Fasilitas kesehatan sangat memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Aksesibilitas lokasi fasilitas kesehatan menjadi salah satu faktor keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi tolok ukur penentuan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam RPJMN 2015-2019, salah satu agenda pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Agenda tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dilaksanakan melalui empat sub agenda prioritas, salah satunya adalah pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat.

Sasaran dari program tersebut salah satunya adalah meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang merata dan mudah dijangkau akan meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Selain itu, mutu pelayanan kesehatan yang baik akan memberikan pelayanan kesehatan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan kesehatan juga dilakukan dengan salah satunya yaitu pengembangan tenaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan begitu, derajat kesehatan masyarakat akan



semakin membaik dan kesehatan masyarakat dapat menjadi investasi untuk pembangunan nasional.

Tabel 3.3 Rasio Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Per 100.000 Penduduk Kabupaten Wakatobi, 2018 dan 2019

Indikator	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Rasio Fasilitas Kesehatan per 100.000 Penduduk		
Rumah Sakit	1	1
Poliklinik/Balai Kesehatan	2	2
Puskesmas	18	21
Pustu	9	7
Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk		
Dokter	18	35
Perawat	186	219
Bidan	93	174
Farmasi	25	40

Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka, Badan Pusat Statistik

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Wakatobi relatif stabil untuk rumah sakit, poliklinik, dan puskesmas. Sementara ketersediaan Puskesmas pembantu (Pustu) mengalami penurunan dari 9 pustu per 100.000 penduduk di tahun 2018 menjadi 7 pustu per 100.000 penduduk di tahun 2019.

Tidak hanya ketersediaan fasilitas kesehatan, keberadaan tenaga kesehatan di tiap fasilitas kesehatan juga menjadi pertimbangan pemerintah, terutama tenaga kesehatan di Puskesmas. Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Selain itu, peran Puskesmas juga semakin penting karena adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana Puskesmas menjadi fasilitas kesehatan pertama bagi masyarakat peserta JKN. Oleh karena itu, kecukupan tenaga kesehatan di Puskesmas juga perlu terus diperhatikan agar peran Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan yang promotif dan preventif dapat tercapai.



Selain puskesmas, fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit juga perlu diperhatikan. Rumah Sakit ini juga berperan penting dalam program JKN. Saat pengobatan tidak dapat terselesaikan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), peserta JKN akan dirujuk untuk melakukan pemeriksaan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yakni Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Pada tahun 2019, secara umum ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Wakatobi mengalami peningkatan (Tabel 3.3). Ketersediaan dokter di tahun 2019 tercatat 35 dokter per 100.000 penduduk. Meskipun meningkat, jumlah dokter di Kabupaten Wakatobi masih cukup jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 tahun 2013 Tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025, target rasio dokter umum adalah 45 dokter per 100.000 penduduk. Dengan demikian, pemerintah perlu kerja keras untuk meningkatkan rasio dokter untuk memenuhi kebutuhan sesuai yang ditargetkan.

Selanjutnya, pada tahun 2019, rasio perawat di Kabupaten Wakatobi adalah 219 perawat per 100.000 penduduk, jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 186 perawat per 100.000 penduduk. Angka ini sudah memenuhi target yang ditetapkan pemerintah yakni 180 perawat per 100.000 penduduk. Kebutuhan tenaga perawat yang sudah sesuai tentu berpengaruh dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Sama halnya dengan ketersediaan perawat, pada tahun 2019 rasio bidan di Kabupaten Wakatobi telah melebihi target 120 bidan per 100.000 penduduk yang ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2019, rasio bidan di Kabupaten Wakatobi tercatat sebanyak 174 bidan per 100.000 penduduk. Sementara itu, ketersediaan farmasi di tahun 2019 mencapai 40 farmasi per 100.000 penduduk.

Secara garis besar, pemerintah masih memiliki banyak tugas dalam mengentaskan permasalahan di bidang kesehatan terutama penyediaan tenaga dan fasilitas kesehatan, guna mengatasi persoalan kematian ibu dan bayi serta perbaikan dalam derajat dan status kesehatan penduduk. Tidak dapat dipungkiri permasalahan kesehatan berkaitan erat dengan kemiskinan dan lingkungan. Oleh karena itu, adanya jaminan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberian bimbingan kesehatan dan kebersihan sejak dini kepada penduduk menjadi penting tercantum dalam program pembangunan berkelanjutan.



<https://wakatobikab.bps.go.id>

BAB 4

PENDIDIKAN

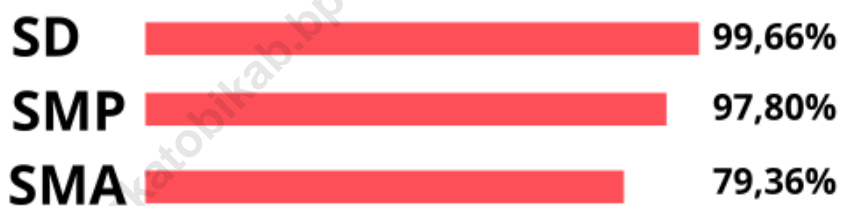


Pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara. Memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat adalah sebuah usaha yang berkelanjutan dari pemerintah.

RATA-RATA
LAMA SEKOLAH

7,73

Angka Partisipasi Sekolah



Tingkat partisipasi penduduk untuk bersekolah menurun seiring meningkatnya kelompok usia sekolah.

HARAPAN
LAMA SEKOLAH

13,20

Rasio Murid per Guru

Pada tahun 2019, tercatat rata-rata 1 guru mengajar 9-11 murid untuk semua jenjang pendidikan wajib belajar 12 tahun.



1 guru
mengajar
11 murid



1 guru
mengajar
9 murid



1 guru
mengajar
10 murid

Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun di Kabupaten Wakatobi memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga Diploma 1 atau 2 (D1/D2). Kenaikan HLS ini menunjukkan ada perbaikan kondisi pendidikan di Kabupaten Wakatobi.





Pemerintah saat ini gencar melaksanakan berbagai macam program pembangunan nasional dalam segala bidang. Menurut Todaro dan Smith (2011), salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara adalah laju pertumbuhan ekonomi yang dapat mencerminkan kemampuan pertambahan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Terdapat tiga komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (termasuk semua investasi baru dalam tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja), pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi.

“Dengan mendapatkan pendidikan yang baik, diharapkan setiap warga negara mampu menjalani hidup terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi ini.”

Menurut Bank Dunia (*World Bank*) Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam menunjang perekonomian suatu wilayah. Menurut Bank Dunia (*World Bank*) Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam menunjang perekonomian suatu wilayah. Itu artinya, untuk memperoleh SDM yang berkualitas, sektor pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah demi menjamin kualitas pendidikan. Indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Tingkat Partisipasi Sekolah. Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.



Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah indikator dasar untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis pada penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu wilayah. Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis huruf latin. Namun pada tahun 2019 masih terdapat sekitar 6,67 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Wakatobi yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018, dimana terdapat 11,52 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin. Penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin kebanyakan adalah penduduk lansia dengan tingkat pendidikan rendah (tidak tamat SD). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, AMH penduduk laki-laki masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Tabel 4.1 Angka Melek Huruf (Persen) Penduduk Kabupaten Wakatobi Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2018 dan 2019

Indikator	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Melek Huruf Latin (persen)	91,84	95,23	85,59	91,65	88,48	93,33

Sumber : Susenas Kor 2018-2019, Badan Pusat Statistik

Rata-Rata dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years Schooling* (MYS) adalah angka yang menunjukkan jumlah tahun belajar yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani (tidak termasuk tahun yang mengulang). RLS dihitung untuk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Pada tahun 2019, RLS Kabupaten Wakatobi ditempuh selama 7,73 tahun, meningkat dari RLS di tahun 2018 selama 7,72 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Wakatobi yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,73 tahun di tahun 2019 atau mengenyam pendidikan hingga kelas VII/VIII SMP. Walaupun tidak cukup signifikan, rata-rata lama



sekolah penduduk Kabupaten Wakatobi berusia 25 tahun ke atas selama tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan.

Tabel 4.2 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Kabupaten Wakatobi Berusia 15 Tahun ke Atas, 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,70	7,71	7,72	7,73
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,87	13,14	13,15	13,20

Sumber : Susenas Kor, Badan Pusat Statistik

Sesungguhnya, angka RLS mencerminkan kondisi pendidikan suatu wilayah beberapa tahun yang lalu, karena ini merupakan *outcome* dari proses pendidikan. Karena RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas, artinya penduduk yang saat ini diperkirakan telah menyelesaikan proses pendidikannya. Sedangkan kondisi pendidikan saat ini akan berpengaruh pada angka Harapan Lama Sekolah (HLS) saat ini dan secara tidak langsung berpengaruh pada angka RLS beberapa tahun kedepan.

Harapan Lama Sekolah (HLS)/*Expected of Years Schooling (EYS)* didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Pada tahun 2019, HLS Kabupaten Wakatobi selama 13,20 tahun, mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 13,15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun di Kabupaten Wakatobi memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga D1 (Diploma 1) atau D2. Kenaikan HLS ini menunjukkan ada perbaikan kondisi pendidikan di Kabupaten Wakatobi.

Tingkat Partisipasi Sekolah

Menjamin sampai tahun 2030 bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar (*primary school*) merupakan salah satu target SDGs. Indikator yang dapat digunakan salah satunya adalah tingkat partisipasi sekolah yang digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari



berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Tabel 4.3 Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni Formal dan Non Formal (Persen) Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Kelamin, 2018 dan 2019

Indikator	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Partisipasi Sekolah						
7 – 12 Tahun	99,37	99,37	100,00	100,00	99,66	99,66
13 – 15 Tahun	97,81	97,90	98,54	97,73	98,19	97,80
16 – 18 Tahun	69,70	79,87	92,22	78,85	81,58	79,36
Angka Partisipasi Murni						
SD	95,36	98,04	100,00	97,69	97,48	97,88
SMP	74,97	74,72	77,07	77,78	76,06	76,53
SMA	53,10	62,28	70,57	63,79	62,31	63,03

Sumber : Susenas Kor 2018-2019, Badan Pusat Statistik

APS adalah rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama. Semakin tinggi APS, maka semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Namun bukan berarti meningkatnya APS juga akan meningkatkan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Selanjutnya, APM adalah persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok umur sekolah yang bersangkutan. APM berfungsi untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap anak pada kelompok umur sekolah.

Banyaknya penduduk usia muda yang belum mengenyam pendidikan atau putus sekolah masih menjadi masalah cukup serius untuk pemenuhan pendidikan wajib 12 tahun di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Wakatobi. Dari nilai APS diketahui bahwa pada tahun 2019 masih ada sekitar 0,34 persen penduduk usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah lagi. Kondisi yang sama juga terjadi di tahun



2018. Sedangkan penduduk yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah lagi pada kelompok umur 13-15 sebanyak 2,20 persen, meningkat bila dibandingkan kondisi 2018 sebesar 1,81 persen. Untuk kelompok penduduk umur 16-18 tahun, di tahun 2019 masih terdapat sebanyak 20,64 persen yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah lagi, naik dari kondisi 2018 sebesar 18,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk mengenyam pendidikan pada anak oleh orang tua semakin menurun. Kemungkinan penyebabnya adalah anak memilih putus sekolah pada usia 13-18 tahun untuk bekerja karena alasan ekonomi keluarga.

Tabel 4.3 juga menunjukkan hal menarik dimana APS penduduk perempuan pada kelompok umur 7-12 tahun sedikit lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki, berbanding terbalik dengan kelompok umur 13-18 tahun dimana APS laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan APS perempuan. Kemungkinan penyebab angka perempuan memilih putus sekolah pada usia 13-18 tahun sedikit lebih tinggi disebabkan oleh keputusan anak perempuan untuk bekerja karena alasan ekonomi keluarga atau menikah lebih dini.

“Terlihat bahwa semakin dewasa usia, penduduk laki-laki relatif lebih banyak yang putus sekolah dibandingkan penduduk perempuan.”

Sama halnya dengan APS, APM secara umum juga menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan sekolah. Dalam perkembangannya, selama tahun 2018-2019 APM cenderung stabil pada jenjang pendidikan SD dan SMP, yaitu sekitar 97 persen di tingkat SD dan 76 persen di tingkat SMP. Sementara untuk jenjang pendidikan SMA mengalami sedikit peningkatan dari 62,31 persen di tahun 2018 menjadi 63,03 persen di tahun 2019.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, APM laki-laki untuk jenjang sekolah dasar pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan APM perempuan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tahun 2018 dimana untuk jenjang sekolah dasar, APM perempuan lebih tinggi dibanding APM laki-laki. Untuk jenjang SMP dan SMA, pada tahun 2018-2019 APM perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan APM laki-laki.

Fenomena tingginya APM perempuan dibanding laki-laki kemungkinan karena anak laki-laki cenderung lebih mudah untuk putus sekolah karena umumnya tuntutan ekonomi yang lebih dibebankan kepada anak laki-laki. Anak laki-laki menjadi tulang punggung keluarga, sehingga tidak sedikit anak laki-laki usia sekolah tersebut yang harus putus sekolah untuk menambah penghasilan keluarga. Hal ini tercermin pada angka TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) laki-laki yang jauh lebih tinggi dibandingkan TPAK



perempuan. Angka TPAK laki-laki yang tinggi menunjukkan kondisi di lapangan bahwa laki-laki cenderung lebih aktif dalam kegiatan ekonomi dibandingkan kaum perempuan.

Hal ini tentunya menjadi perhatian kita bersama untuk terus meningkatkan pencapaian pendidikan baik bagi laki-laki maupun perempuan agar seluruh anak di Kabupaten Wakatobi bisa mencapai wajib belajar 12 tahun. Dengan kata lain anak-anak harus dapat menyelesaikan pendidikannya hingga tamat sekolah menengah (SMA/SMK/Sederajat). Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan. Pelaksanaan Wajar 12 Tahun, antara lain, ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pengentasan kemiskinan. Upaya Indonesia untuk keluar dari “jebakan pendapatan menengah” hanya akan terealisasi jika tersedia tenaga kerja terampil secara memadai terutama untuk bersaing dalam skala global.

Ketersediaan dan Kualitas Sarana Fisik Sekolah

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan program penyelenggaraan pendidikan. Menurut Depdiknas (2008), sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Sedangkan menurut tim penyusun pedoman pembakuan media pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar-mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Sarana adalah alat yang digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan misalnya ruang kelas, buku, papan tulis, dan lainnya. Sedangkan Prasarana adalah alat tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan misalnya lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan lain sebagainya.

Salah satu penyediaan sarana pendidikan yaitu ketersediaan sekolah dan kapasitas ruang kelas yang dapat menampung siswa. Semakin banyak sekolah yang berada di suatu daerah akan semakin banyak menampung siswa sehingga akan meningkatkan partisipasi sekolah. Berdasarkan data Podes 2018, 87 persen desa sudah mempunyai sarana sekolah dasar (SD) dan sisanya 13 persen desa belum terdapat adanya SD. Untuk keberadaan SMP dan SMA, semua kecamatan di Kabupaten Wakatobi sudah memiliki sarana SMP dan SMA. Sementara itu, untuk jenjang vokasi (SMK), hanya ada tiga



kecamatan yang memiliki sarana SMK, yakni Kecamatan Tomia, Kaledupa, dan Wangi-Wangi.

Tabel 4.4 Perkembangan Rasio Murid-Sekolah, Rasio Guru-Sekolah, dan Rasio Murid-Guru Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020

Indikator	Tahun Ajaran	
	2018/2019	2019/2020
(1)	(2)	(3)
Rasio Siswa per Sekolah		
SD/MI	105	106
SMP/MTs	118	121
SMA/MA/SMK	190	198
Rasio Guru per Sekolah		
SD/MI	9	10
SMP/MTs	14	14
SMA/MA/SMK	18	19
Rasio Siswa per Guru		
SD/MI	12	11
SMP/MTs	9	9
SMA/MA/SMK	11	10

Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka, Badan Pusat Statistik

Selain keberadaan sekolah, perlu juga melihat indikator lain untuk melihat daya tampung siswa, yaitu dengan menggunakan indikator rasio siswa per sekolah. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi (tabel 4.4), pada tahun ajaran 2019/2020 rasio siswa per sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI mencapai 106 orang. Hal ini berarti rata-rata SD/MI di Kabupaten Wakatobi mampu menampung siswa sebanyak 106 orang. Sementara itu, rasio siswa per sekolah untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK masing-masing mencapai 121 orang dan 198 orang. Pada jenjang pendidikan menengah ditunjukkan bahwa rasio siswa per sekolah lebih tinggi dari SD dan SMP. Hal ini dapat dimengerti mengingat jumlah sekolah SMA/MA/SMK relatif lebih sedikit. Secara umum rasio siswa per sekolah di setiap



jenjang pendidikan di tahun ajaran 2019/2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya.

Distribusi guru juga hendaknya mendapat perhatian dari pemerintah. Distribusi guru yang tidak merata akan menimbulkan permasalahan lain dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Guru merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Hal ini disebabkan karena guru merupakan titik sentral dalam pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan.

Sampai sekarang ini, jumlah guru di Kabupaten Wakatobi mengalami peningkatan meski tidak terlalu banyak. Menurut data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wakatobi dan Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi hingga tahun ajaran 2019/2020, jumlah guru di Kabupaten Wakatobi sudah mencapai lebih dari 2.000 orang dengan rincian 1.180 guru SD/MI, 734 guru SMP/MTs, dan 567 guru SMA/MA/SMK. Namun demikian, penambahan guru baru pada periode tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan jumlah tenaga pendidik, sehingga pertumbuhan jumlah guru tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah siswa. Hal ini berakibat pada mengecilnya rasio siswa per guru yang pada tahun 2019 mencapai 11 untuk SD/MI, 9 untuk SMP/MTs, dan 10 untuk SMA/MA/SMK. Rasio siswa per guru yang rendah ini menciptakan pemanfaatan guru yang tidak efisien. Berdasarkan PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyatakan bahwa rasio minimal jumlah siswa per guru adalah 20:1 pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA. Sementara menurut RPJMN, rasio siswa per guru di negara-negara berpendapatan setara dengan Indonesia (berpendapatan menengah ke bawah) adalah sebesar 29:1 (SD), 24:1 (SMP), dan 20:1 (SMA).

“Penambahan guru baru yang tidak didasarkan pada kebutuhan jumlah tenaga pendidik, sehingga pertumbuhan jumlah guru tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah siswa hanya akan menciptakan pemanfaatan guru yang tidak efisien.”

BAB 5

KETENAGAKERJAAN

Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja tentunya akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja menurun.

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

69,34

▼ menurun 1,14% dari tahun 2018

TINGKAT KESEMPATAN KERJA

97,52

▼ menurun 0,05% dari tahun 2018

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

2,48

▲ meningkat 0,05%
dari tahun 2018

♂ **Laki-laki** : 2,70

♀ **Perempuan** : 2,21



Mayoritas penduduk menganggur pada tahun 2019 berpendidikan SMA ke atas, khususnya pada jenjang Diploma I/II/III. Fenomena pengangguran ini tidak terlepas dari jumlah lapangan kerja yang terbatas.



Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan. Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, dan jumlah jam kerja.

“Data dan informasi mengenai ketenagakerjaan dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.”

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan indikator penting ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga yang aktif dalam kegiatan ekonomi. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula ketersediaan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam kurun waktu tertentu.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Wakatobi pada Agustus 2019 mencapai 44.838 orang, berkurang sebanyak 1.204 orang dibandingkan Agustus 2018. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, TPAK bergerak turun dari 70,48 persen pada Agustus 2018 menjadi 69,34 persen di pada Agustus 2019. Artinya, pada tahun 2019 terdapat pengurangan pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi



barang dan jasa dalam perekonomian di Kabupaten Wakatobi sebanyak 1,14 persen dibandingkan tahun 2018.

Tabel 5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) di Kabupaten Wakatobi, 2015-2019

Indikator	2015	2016 ¹	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	67,73	-	64,88	70,48	69,34

Catatan : ¹Data tidak tersedia

Sumber : Sakernas (kondisi bulan Agustus), Badan Pusat Statistik

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja tentunya akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan tingkat kesempatan kerja yang ada. Kemudahan berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian merefleksikan kemudahan masyarakat mencari kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dirinya sekaligus berpartisipasi untuk mendapatkan imbalan berupa balas jasa atas faktor produksi dalam kegiatan ekonomi.

Tabel 5.2 Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin (Persen) di Kabupaten Wakatobi, 2018-2019

Indikator	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tingkat Kesempatan Kerja (persen)	97,96	97,30	97,06	97,79	97,57	97,52

Sumber : Sakernas (kondisi bulan Agustus), Badan Pusat Statistik

Tingkat kesempatan kerja (TKK) adalah ukuran yang menggambarkan persentase angkatan kerja yang bekerja atau angkatan kerja yang sudah terserap dalam aktivitas perekonomian. Indikator TKK juga menunjukkan kemudahan angkatan kerja untuk berpartisipasi secara ekonomi di seluruh sektor. Keadaan Agustus 2019, dari total angkatan kerja yang ada, sekitar 97,52 persennya adalah penduduk yang bekerja. Ini mengindikasikan dari 100 orang yang tergolong angkatan kerja terdapat sekitar 97 hingga



98 orang telah bekerja atau terserap dalam pasar kerja yang tersebar di berbagai sektor perekonomian. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TKK angkatan kerja perempuan di tahun 2019 mencapai 97,79 persen, lebih tinggi dibandingkan angkatan kerja laki-laki yang sebesar 97,30 persen. Terlihat perbedaannya tidak terlalu signifikan, artinya baik angkatan kerja laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Wakatobi memiliki kesempatan yang sama untuk terserap dalam pasar kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu isu penting dalam bidang ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Isu ini menjadi fokus perhatian selain partisipasi angkatan kerja dan struktur ketenagakerjaan. Ditinjau dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan hasil dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Jumlah lapangan kerja yang tersedia memiliki keterbatasan secara jumlah dan kualifikasi bagi pencari kerja.

Pengangguran merupakan akibat dari peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah lapangan kerja. Lapangan kerja semakin sempit sehingga banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja. Faktor yang menyebabkan *excess supply* tenaga kerja ini antara lain tingkat investasi yang rendah sehingga perusahaan dalam negeri sulit mengembangkan dan meningkatkan usahanya, angkatan kerja yang sedang mencari kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia usaha, tidak ada kecocokan upah, dan tidak memiliki kemauan wirausaha.

Pengangguran terbuka sendiri didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka.

Indikator untuk mengukur tingkat pengangguran yaitu TPT. TPT mengukur penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar tenaga kerja. TPT dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. TPT di Kabupaten Wakatobi pada Agustus 2019 sebesar 2,48 persen, mengalami kenaikan bila dibandingkan TPT Agustus 2018 sebesar 2,43 persen (Tabel 5.3).



Tabel 5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) di Kabupaten Wakatobi, 2015-2019

Indikator	2015	2016 ¹	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,24	-	2,43	2,43	2,48

Catatan : ¹Data tidak tersedia

Sumber : Sakernas (kondisi bulan Agustus), Badan Pusat Statistik

Fenomena pengangguran ini tidak terlepas dari jumlah lapangan kerja yang terbatas dan adanya kecenderungan penyerapan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Tetapi karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk yang berpendidikan tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Berbeda halnya dengan penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah, mereka cenderung tidak pilih-pilih pekerjaan sehingga pekerjaan apapun akan mereka terima. Hal tersebut menyebabkan rendahnya tingkat pengangguran penduduk berpendidikan rendah.

Tabel 5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin (Persen) di Kabupaten Wakatobi, 2018-2019

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
≤ SD atau sederajat	1,08	2,09	0,91	0,00	1,00	1,11
SMP atau sederajat	0,00	5,24	0,00	1,49	0,00	3,31
SMA Umum	3,08	2,48	7,42	4,71	4,71	3,18
SMA Kejuruan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diploma I/II/III	0,00	9,69	0,00	5,97	0,00	7,73
Universitas	5,94	0,00	7,55	8,08	6,70	4,24
Kabupaten Wakatobi	2,04	2,70	2,94	2,21	2,43	2,48

Sumber : Sakernas (kondisi bulan Agustus), Badan Pusat Statistik



Pada tabel 5.4 tampak bahwa mayoritas penduduk menganggur di tahun 2019 berpendidikan SMA ke atas, khususnya pada jenjang pendidikan diploma I/II/III. Jika dilihat perkembangannya, terjadi peningkatan angka TPT berpendidikan diploma I/II/III dimana pada Agustus 2018 tidak ada yang menganggur, kemudian naik menjadi 7,73 persen pada Agustus 2019. Peningkatan tersebut terjadi baik pada penduduk berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, yang awalnya tidak ada yang menganggur di Agustus 2018, kemudian Agustus 2019 TPT masing-masing menjadi 9,69 dan 5,97 persen. Kemungkinan penyebabnya adalah semakin meningkatnya angkatan kerja pendidikan diploma I/II/III tidak dibarengi dengan penyerapan angkatan kerja tersebut karena lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas. Padahal angkatan kerja diploma I/II/III adalah angkatan kerja yang “siap kerja” di lapangan.

Untuk angkatan kerja dengan jenjang pendidikan SMA keatas, penurunan TPT pada Agustus 2019 dibandingkan dengan kondisi Agustus 2018 terjadi pada angkatan kerja berpendidikan SMA umum (dari 4,71 persen ke 3,18 persen) dan universitas (dari 6,70 persen ke 4,24 persen). Sementara untuk angkatan kerja berpendidikan SMA kejuruan tidak ada yang menjadi pengangguran pada tahun 2018 dan 2019. Dengan demikian, angkatan kerja lulusan SMA umum, SMA kejuruan dan Universitas terserap dengan cukup baik di lapangan pekerjaan di Kabupaten Wakatobi.

Lapangan Usaha

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dikelompokkan kedalam 3 sektor utama, yaitu **Pertanian** (pertanian, kehutanan, dan perikanan), **Industri** (pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; dan konstruksi) dan **Jasa-Jasa** (perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estat; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya).

Secara umum, penduduk yang bekerja di Kabupaten Wakatobi didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor jasa-jasa, kemudian disusul oleh sektor pertanian dan industri. Pada tahun 2019 terdapat peningkatan penduduk yang bekerja di sektor pertanian, yang awalnya sebanyak 37,48 persen di tahun 2018 kemudian menjadi 40,15 persen di tahun 2019 (Tabel 5.5). Kondisi sebaliknya ditemukan pada dua sektor lainnya, dimana penurunan persentase penduduk yang bekerja pada tahun 2019 dibandingkan



dengan tahun sebelumnya terjadi di sektor industri (dari 16,73 persen turun ke 15,16 persen) dan sektor jasa-jasa (dari 45,79 persen turun ke 44,69 persen). Tabel 5.5 memperlihatkan bahwa selama dua tahun terakhir, telah terjadi pergeseran pola ketenagakerjaan yang dulunya didominasi oleh sektor pertanian, telah bergerak menuju sektor industri dan jasa-jasa yang membutuhkan spesifikasi kemampuan dan keahlian yang lebih tinggi. Pada akhirnya, klasifikasi angkatan kerja menurut lapangan usaha atau sektor tersebut diperlukan untuk melihat besarnya penyerapan tenaga kerja pada sektor perekonomian tertentu. Penyerapan tenaga kerja bisa menggambarkan struktur perekonomian di suatu daerah.

Tabel 5.5 Persentase Penduduk Kabupaten Wakatobi yang Bekerja (Persen), 2018-2019

Kelompok Kategori Lapangan Usaha	Tahun	
	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Pertanian	37,48	40,15
Industri	16,73	15,16
Jasa-Jasa	45,79	44,69
Kabupaten Wakatobi	100,00	100,00

Sumber : Sakernas (kondisi bulan Agustus), Badan Pusat Statistik

Jumlah Jam Kerja

Jumlah jam kerja yang dicakup dalam bab ini merupakan jumlah jam kerja seluruh pekerjaan baik pekerjaan utama maupun pekerjaan tambahan selama seminggu. Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pengangguran terselubung apabila mereka bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu atau kurang dari 35 jam. Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan di bawah kemampuan sebenarnya. Selain itu, seseorang yang terpaksa bekerja di bawah 35 jam merupakan pekerja yang memiliki kemampuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Semakin banyak pekerja yang bekerja di bawah 35 jam selama seminggu, maka semakin

“Seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pengangguran terselubung apabila mereka bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.”



banyak tenaga kerja yang kurang termanfaatkan dan menggambarkan semakin banyaknya pekerjaan tidak layak yang tersedia. Informasi mengenai pengangguran terselubung dapat dijadikan acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja.

Berdasarkan Tabel 5.6, terlihat bahwa mayoritas pekerja di Kabupaten Wakatobi memiliki jumlah jam kerja selama seminggu di atas 35 jam. Secara total, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 51,45 persen pekerja di Kabupaten Wakatobi yang bekerja lebih dari 35 jam seminggu. Angka tersebut menurun cukup signifikan dibandingkan kondisi 2018 dimana terdapat sebanyak 61,60 persen pekerja dengan jam kerja selama seminggu diatas 35 jam. Penurunan angka tersebut juga mengindikasikan peningkatan pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, dari 38,40 persen di tahun 2018 naik menjadi 48,55 persen di tahun 2019. Dari angka-angka tersebut, kemungkinan terjadi kenaikan jumlah pekerja dengan pendapatan yang diperoleh dibawah kemampuan mereka yang sebenarnya, atau malah jumlah pekerja yang bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan keterampilan mereka meningkat. Keadaan ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah agar kesejahteraan pekerja-pekerja yang terindikasi “pengangguran terselubung” tersebut terjamin.

Tabel 5.6 Persentase Pekerja Menurut Jenis Kelamin dan Jam Kerja di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2018-2019

Jam Kerja	2018			2019		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 ¹	4,61	2,45	3,67	6,44	4,96	5,77
1 – 7	1,31	3,95	2,46	0,94	3,97	2,32
8 – 14	4,25	9,60	6,58	6,84	15,52	10,76
15 – 24	11,23	14,62	12,71	12,23	20,08	15,77
25 – 34	7,73	19,79	12,99	12,24	16,00	13,93
35 – 40	15,99	14,17	15,20	14,59	15,11	14,82
41+	54,88	35,43	46,40	46,72	24,36	36,63
Kabupaten Wakatobi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : ¹Sementara tidak bekerja (misalnya cuti, menunggu panen, dan sebagainya)

Sumber : Sakernas (kondisi bulan Agustus), Badan Pusat Statistik



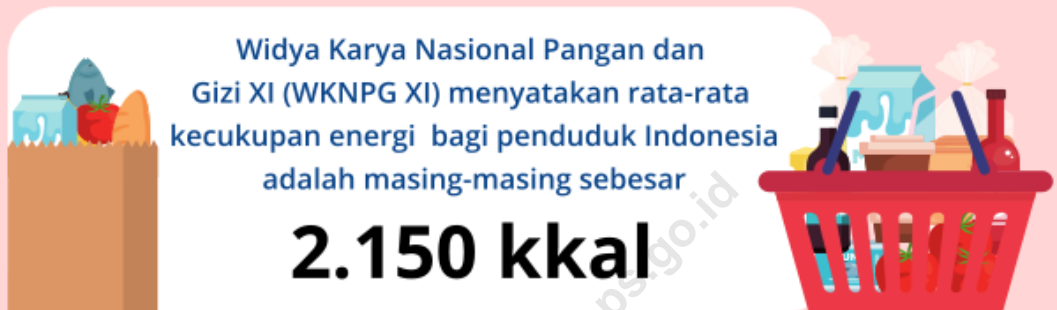
Hal menarik lainnya adalah analisis jam kerja berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan Tabel 5.6 rupanya “pengangguran terselubung” didominasi oleh pekerja dengan jenis kelamin perempuan. Dari keseluruhan pekerja laki-laki, sebanyak 38,69 persen terindikasi sebagai “pengangguran terselubung”, meningkat dari angka 2018 sebesar 29,13 persen. Sementara sebanyak 60,53 persen dari keseluruhan pekerja perempuan terindikasi sebagai “pengangguran terselubung”. Meskipun sama-sama mengalami kenaikan di tahun 2019, namun persentase pekerja perempuan yang terindikasi sebagai “pengangguran terselubung” jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja laki-laki. Kemungkinan penyebabnya adalah beban kebanyakan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan sebagai sumber pendapatan sehingga sulit bagi mereka untuk tidak bekerja. Kemungkinan lain penyebab tinggi pengangguran terselubung di kalangan perempuan adalah masih adanya diskriminasi terhadap perempuan atau hambatan sosial budaya lainnya. Perempuan yang telah menikah juga menghadapi kodratnya sebagai ibu rumah tangga sehingga lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus rumah tangga.

<https://wakatobikab.go.id>

BAB 6

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dikatakan membaik apabila pendapatan meningkat dan sebagian pendapatan tersebut digunakan untuk mengonsumsi barang non makanan.



Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari pada kelompok pengeluaran 40% terendah masih jauh di bawah ketentuan yang ditetapkan oleh WKNPG XI.

1.684,87 kkal



2.199,23 kkal



2.726,04 kkal



**RATA-RATA KONSUMSI KALORI PER KAPITA PER HARI
MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN DI KABUPATEN WAKATOBI**



Pola konsumsi sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dapat dikatakan membaik apabila pendapatan meningkat dan sebagian pendapatan tersebut digunakan untuk mengonsumsi barang non makanan, begitupun sebaliknya. Pergeseran pola pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dari makanan ke non makanan dapat dijadikan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan asumsi bahwa setelah kebutuhan makanan telah terpenuhi, kelebihan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi bukan makanan. Atau secara umum dapat dikatakan tingkat pendapatan yang berbeda-beda menyebabkan keanekaragaman taraf konsumsi suatu masyarakat atau individu.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pola konsumsi masyarakat secara mudah dapat diukur dari pengeluarannya. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran makanan ke pengeluaran non makanan. Pergeseran pola pengeluaran dari makanan ke non makanan terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya permintaan terhadap barang non makanan pada umumnya tinggi.

Tabel 6.1 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Wakatobi (Rupiah), 2018-2019

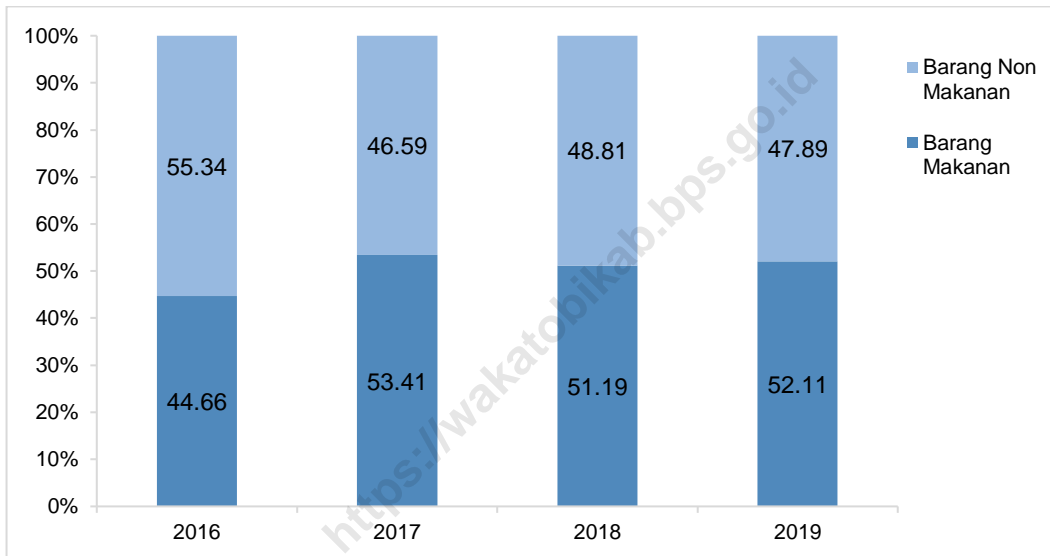
Jenis Pengeluaran	Nominal (Rp)	
	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Makanan	434.214	407.837
Non Makanan	413.979	374.878
Perumahan, Bahan Bakar, dan Penerangan	207.790	200.589
Aneka Barang dan Jasa	104.377	72.126
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	26.028	22.460
Barang Tahan Lama	43.421	42.335
Lainnya	32.363	37.368
Kabupaten Wakatobi	848.193	782.715

Sumber : Susenas Kor 2018-2019, Badan Pusat Statistik



Dari sisi perkembangan tingkat pendapatan yang didekati dengan tingkat pengeluaran, secara umum tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Wakatobi mengalami penurunan di tahun 2019. Gambar 6.1 menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Wakatobi menurun. Pengeluaran per kapita per bulan Kabupaten Wakatobi pada tahun 2019 sebesar Rp782.715,00, menurun dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp848.193,00. Penurunan pengeluaran per kapita perbulan terjadi baik di komoditas makanan maupun komoditas bukan makanan.

Gambar 6.1 Persentase Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Kelompok Barang Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2016-2019



Sumber : Susenas Kor 2016-2019, Badan Pusat Statistik

Lebih lanjut diamati bahwa alokasi pengeluaran antara makanan dan non makanan terdapat pergeseran dari yang sebelumnya pada tahun 2016 dominan di pengeluaran non makanan, pada tahun 2017 – 2019 lebih dominan di pengeluaran makanan (gambar 6.1). Padahal tren pengeluaran non makanan di atas 50 persen diharapkan bisa berlanjut, sebab menurut beberapa ekonom, peningkatan pendapatan lazimnya diikuti dengan peningkatan konsumsi non makanan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada tingkat tertentu, konsumsi untuk makanan akan sampai pada titik jenuh, dan ketika peningkatan konsumsi non makanan terdeteksi, maka bisa disimpulkan bahwa tingkat ekonomi masyarakat setempat sudah melewati batas “sekadar memenuhi kebutuhan makanan”.



Tabel 6.2 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Wakatobi (Rupiah), 2018-2019

Jenis Pengeluaran	Nominal (Ribuan Rupiah)					
	40% Terbawah		40% Menengah		20% Teratas	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Makanan	203,18	187,55	439,82	409,98	887,68	855,18
Non Makanan	158,09	147,36	356,92	344,72	1.042,06	903,89
Perumahan, Bahan Bakar, dan Penerangan	87,04	81,98	210,35	205,61	445,53	433,45
Aneka Barang dan Jasa	41,99	31,13	83,65	75,84	271,07	148,52
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	7,35	8,50	24,57	22,41	66,49	51,19
Barang Tahan Lama	6,45	3,51	16,79	18,28	170,74	171,74
Lainnya	15,26	22,24	21,56	22,58	88,24	98,99
Kabupaten Wakatobi	361,27	334,91	796,74	754,71	1.929,74	1.759,07

Sumber : Susenas Kor 2018-2019, Badan Pusat Statistik

Bila dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, maka terjadi penurunan pengeluaran makanan maupun non makanan di tahun 2019 untuk penduduk yang tergolong kedalam kelompok 40% pengeluaran terbawah, 40% pengeluaran menengah, dan 20% pengeluaran teratas (Tabel 6.2). Penurunan pengeluaran per kapita terbesar dirasakan oleh penduduk pada kelompok 20% pengeluaran teratas, yaitu dari 1,93 juta rupiah di tahun 2018 turun sebanyak 8,84 persen menjadi 1,76 juta rupiah. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah pendapatan yang diperoleh oleh penduduk yang tergolong 20% teratas lebih banyak yang dialokasikan untuk tabungan atau pembelian aset.

Dilihat dari kelompok pengeluarannya, penduduk yang berada pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah (kelompok pendapatan menengah kebawah) mengeluarkan duit lebih banyak untuk makanan dibanding belanja kebutuhan non makanan. Hal yang sama juga terlihat pada penduduk yang berada pada kelompok



pengeluaran 40 persen menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk pada kelompok pengeluaran menengah ke bawah masih berada pada taraf ekonomi kurang sejahtera. Sementara penduduk yang berada pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas bisa dikatakan telah mencapai peningkatan kesejahteraan. Hal ini ditunjukkan dari adanya pergeseran pengeluaran dari komoditas makanan ke komoditas non makanan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Konsumsi Energi dan Protein

Masih mengacu kepada Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI (WKNPG XI) tahun 2012, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia adalah masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein pada Tabel 6.3 dapat menjadi salah satu indikator acuan.

Tabel 6.3 Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kkal) dan Protein (Gram) Per Kapita Per Hari Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Wakatobi, 2018-2019

Rata-Rata Konsumsi	Kelompok Pengeluaran							
	40% Terendah		40% Menengah		20% Teratas		Kab Wakatobi	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kalori (kkal)	1.737,58	1.684,87	2.418,87	2.199,23	3.108,35	2.726,04	2.282,74	2.096,10
Protein (gram)	52,29	45,41	75,95	63,32	98,70	90,17	70,98	61,39

Sumber : Susenas Kor 2018-2019, Badan Pusat Statistik

Rata-rata konsumsi kalori penduduk Kabupaten Wakatobi pada tahun 2019 sebesar 2096,10 kkal rupanya belum melampaui batas ketentuan yang ditetapkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI (WKNPG XI) tahun 2012. Sementara untuk rata-rata konsumsi protein per kapita sudah melampaui batas ketentuan yang ditetapkan, yaitu sebanyak 61,39 gram pada tahun 2019. Akan tetapi, jika dirinci lebih jauh berdasarkan kelompok pengeluaran penduduk, konsumsi energi dan protein penduduk di Kabupaten Wakatobi tampak ketimpangan yang lebar antara penduduk pada kelompok pengeluaran 40 persen terendah dengan penduduk pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas.



Tabel 6.3 menunjukkan rata-rata konsumsi kalori dan protein per kapita per hari kelompok pengeluaran 40 persen terendah jauh di bawah ketentuan yang ditetapkan oleh WKNPG XI, sementara konsumsi energi dan protein penduduk pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas jauh melampaui ketentuan yang ditetapkan bahkan melampaui rata-rata konsumsi penduduk Kabupaten Wakatobi. Dibalik angka tersebut, rupanya terjadi penurunan konsumsi kalori dan protein di tahun 2019 untuk ketiga kelompok pendapatan. Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dan semua pihak terkait pemerataan gizi ke seluruh penduduk di Kabupaten Wakatobi tanpa terkecuali.

<https://wakatobikab.bps.go.id>



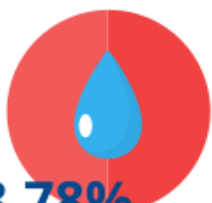
<https://wakatobikab.bps.go.id>

BAB 7

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Pembangunan perumahan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penciptaan lapangan kerja.

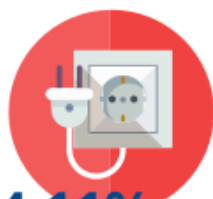
Air Bersih



78,78%

rumah tangga di Kabupaten Wakatobi memiliki akses terhadap sumber air minum dari leding, pompa, air dalam kemasan, sumur terlindungi, dan mata air terlindungi.

Sumber Penerangan



94,11%

rumah tangga di Kabupaten Wakatobi sudah menggunakan PLN sebagai sumber penerangan utamanya.

Sanitasi Layak

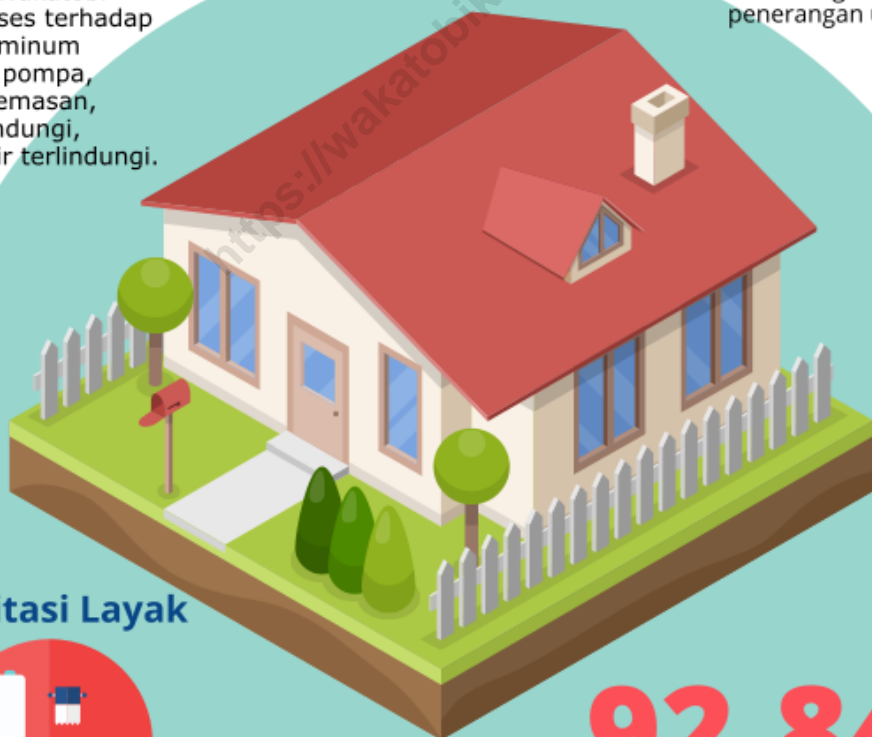


89,00%

rumah tangga di Wakatobi sudah menggunakan tangki septik/SPAL/IPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja.

92,84%

rumah tangga di Kabupaten Wakatobi tinggal di rumah milik sendiri





Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, dengan cara terpenuhi kebutuhan fisik dan rohaninya. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya, dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak atas perumahan sebagai hak dasar berasal dari keberlangsungan hidup dan menjaga martabat kehidupan umat manusia. Pemenuhan hak dasar tersebut akan membentuk watak dan kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, berjati diti, mandiri, dan produktif.

Disamping sebagai sebagai sarana kebutuhan kehidupan, perumahan merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati diri. Pembangunan perumahan juga akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta penciptaan lapangan kerja. Pembangunan di bidang perumahan yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan serta. Di samping itu, upaya peningkatan pembangunan perumahan juga perlu didukung dengan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaannya.

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Pemenuhan kebutuhan dasar manusia menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman agar masyarakat dapat bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2011. Pemenuhan kewajiban negara dalam menyelenggarakan pembangunan perumahan dan pemukiman bagi rakyatnya adalah dalam rangka memenuhi hak-hak sipil, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negara. Penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak, aman, dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen global sebagaimana yang tertuang dalam *Sustainable Development*



Goals (SDGs). Untuk itu, pemerintah bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tempat Tinggal

Rumah tempat tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa di antaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Berdasarkan data Susenas 2019, sudah hampir seluruh rumah tangga di Sulawesi Tenggara bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah. Pada tahun 2019, rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 99,80 persen atau meningkat proporsinya bila dibandingkan kondisi tahun 2017 yang sebesar 99,40 persen.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Dari hasil Susenas 2018, rumah tinggal dengan atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes mencapai 99,60 persen dan pada tahun 2019 turun menjadi 99,40 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pada persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan dinding terluas tembok dan kayu juga relatif menurun, dari 99,80 persen (2018) menjadi 94,50 persen (2019).

Menurut badan kesehatan dunia WHO, salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) menurut Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8



m² (BPS, 2001). Pada tahun 2019, persentase rumah tinggal dengan rata-rata luas lantai per kapita di atas 10 m² telah mencapai 88,20 persen.

Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2018-2019

Indikator Kualitas Perumahan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Lantai bukan tanah (persen)	99,40	99,80
Atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes (persen)	99,60	99,40
Dinding terluas tembok, plasteran anyaman bambu/kawat, atau kayu/batang Kayu (persen)	99,80	94,50
Persentase rata-rata luas lantai per kapita > 10 m ² (persen)	-*	88,20

Catatan : * data tidak tersedia

Sumber : Susenas Kor 2018-2019, Badan Pusat Statistik

Fasilitas Rumah Tempat Tinggal

Sama halnya dengan kondisi fisik dari tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal yang lengkap dan baik juga sangat memengaruhi kesehatan dan kenyamanan penghuninya. Kelengkapan fasilitas rumah tinggal merupakan gambaran kualitas kesehatan lingkungan dan telah menjadi perhatian pemerintah terutama Kementerian Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2016, pemerintah perlu menjamin pemenuhan komponen rumah sehat bagi keluarga, yaitu akses/ketersediaan air bersih dan akses/penggunaan jamban sehat.

Kondisi fasilitas rumah tangga di Kabupaten Wakatobi sudah mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 jika dilihat dari beberapa indikator. Pada tahun 2019 tercatat sebesar 94,11 persen rumah tangga di Kabupaten Wakatobi sudah menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan, meningkat sebesar 2,65 persen dibandingkan tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019, rumah tangga di Kabupaten Wakatobi yang mengakses air minum bersih mencapai 78,78 persen, meningkat 11,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase rumah tangga yang memiliki akses



ke sumber air layak minum juga mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2019 (81,93 persen) dibanding tahun 2018 (63,84 persen).

Gambar 7.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2018-2019

Fasilitas Perumahan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Air Minum Bersih ¹ (persen)	67,09	78,78
Air Minum Layak ² (persen)	63,84	81,93
Jamban Sendiri (persen)	89,10	85,85
Jamban ³ dengan Tangki Septik, IPAL (persen)	88,84	78,59
Sumber Penerangan Listrik PLN (persen)	91,46	94,11

Catatan : ¹Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat \geq 10 m]

² Terdiri dari leding, air hujan, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air Terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat \geq 10 m] dan dikombinasikan dengan penggunaan air mandi/cuci yang bersumber dari air terlindung bila sumber air minum utama menggunakan air kemasan/isi ulang dan air tidak terlindungi

³ Termasuk jamban milik sendiri dan jamban bersama

Sumber : Susenas Kor 2018-2019, Badan Pusat Statistik

Fasilitas rumah tangga lainnya yang sangat penting, yaitu kepemilikan jamban sendiri dan penggunaan jamban dengan tangka septik dan IPAL. Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting perannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat, yaitu ketersediaan jamban dengan tangki septik dan IPAL. Pada tahun 2019, rumah tangga yang



menggunakan jamban sendiri mencapai 85,85 persen atau mengalami penurunan sebesar 3,25 persen dibanding kondisi tahun 2018.

Kepemilikan fasilitas rumah tangga lain berupa kepemilikan jamban sendiri dan penggunaan jamban dengan tangka septik dan IPAL mengalami penurunan di tahun 2019. Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri di tahun 2019 mencapai 85,85 persen atau mengalami penurunan sebesar 3,25 persen dibanding kondisi tahun 2018. Sementara itu, persentase rumah tangga yang menggunakan tangki septik dan IPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja di tahun 2019 sebesar 78,59 persen atau turun drastis dari kondisi tahun 2018. Menurunnya persentase fasilitas jamban dengan tangki septik perlu diperhatikan penyebabnya, apakah karena bertambahnya pembangunan rumah di tahun 2019 sehingga belum selesai sebagian fasilitas perumahannya, ataukah karena faktor lain seperti kerusakan.

Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat yaitu dari status kepemilikan rumah. Hal ini berkaitan dengan *security of tenure* atau keamanan menghuni rumah dalam jangka panjang karena adanya status kepemilikan. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dianggap memiliki jaminan kepastian bermukim yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri. Tabel 7.3 menunjukkan persentase rumah tangga dengan status rumah milik sendiri cenderung meningkat di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Di sisi lain, masih terdapat 7,16 persen rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri seperti dengan cara sewa/kontrak, tinggal di rumah dinas/rumah adat, ataupun menempati rumah milik keluarga/kerabat.

Kepemilikan rumah layak huni merupakan salah satu wujud terciptanya harkat dan martabat manusia sehingga pembangunan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas nasional. Pemerintah wajib memberi kemudahan pembangunan dan perolehan rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan sinergi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, sektor swasta, *stakeholder* terkait, LSM, dan masyarakat, diharapkan akses masyarakat untuk memiliki rumah layak huni dapat segera terpenuhi.



Gambar 7.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2018-2019

Fasilitas Perumahan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri (persen)	92,67	92,84
Bukan Milik Sendiri ¹ (persen)	7,33	7,16

Sumber : Susenas Kor 2018-2019, Badan Pusat Statistik

<https://wakatobikab.bps.go.id>

BAB 8

KEMISKINAN

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

GARIS KEMISKINAN KABUPATEN WAKATOBI

Rp 278,929

2019

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis kemiskinan merupakan jumlah uang minimal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan per orang untuk satu bulan.

Pada tahun 2019, terdapat

14.400

penduduk miskin di
Kabupaten Wakatobi

14.75

persen dari
total populasi

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN

2.19

Kedalaman kemiskinan di cenderung turun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,90 sehingga kemampuan penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan semakin tinggi.

INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN

0.58

Kabupaten Wakatobi pada tahun 2019 mencatat penurunan dari 0,74 pada tahun 2018. Penurunan mengindikasikan kehidupan ekonomi sebagian penduduk miskin di Kabupaten Wakatobi telah mengalami perbaikan.

Tujuan pertama yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun.





Kemiskinan menjadi salah satu topik utama dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pertama yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun. SDGs sendiri merupakan bentuk aksi dunia terhadap beragam masalah terkait bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola. Penempatan kemiskinan di tujuan pertama SDGs juga didukung dengan Perpres No.59 Tahun 2017 yang memetakan dengan rinci tujuan pengentasan kemiskinan ke dalam beberapa aspek, seperti kesejahteraan, jaminan kesehatan nasional, pemenuhan hak dasar, serta membangun ketahanan masyarakat miskin dan rentan miskin.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan SDGs yang pertama yaitu tanpa kemiskinan (*no poverty*)

Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Perkembangan Penduduk Miskin

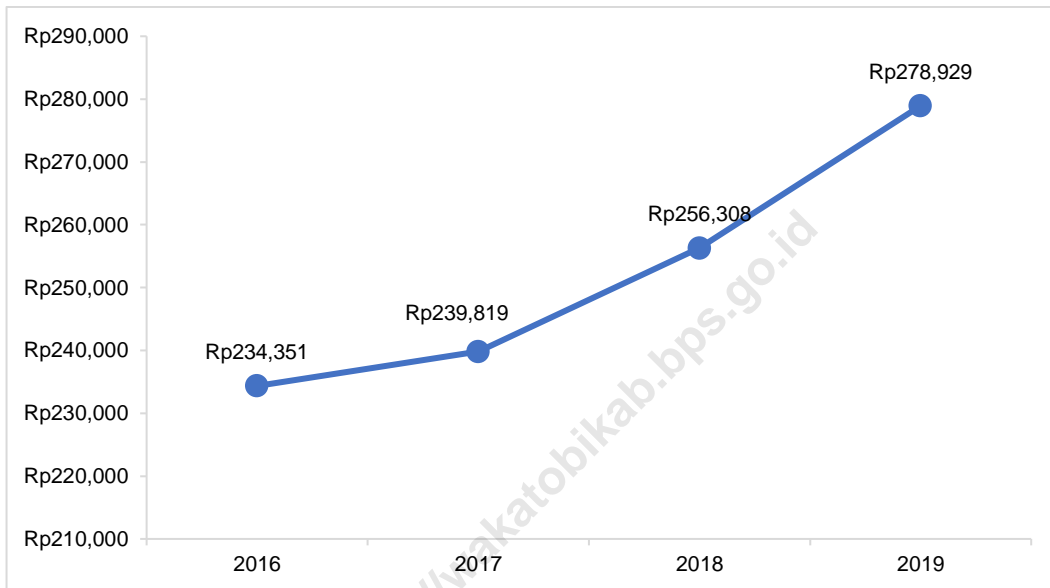
Dalam konsep BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Suatu penduduk dikatakan miskin atau tidak miskin berdasarkan pada garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri merupakan jumlah uang minimal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan per orang untuk satu bulan. Seorang penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan selalu mengalami peningkatan setiap tahun mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan dan bukan makanan. Garis kemiskinan di Kabupaten Wakatobi tahun 2019 sebesar Rp278.929,00 per kapita sebulan. Artinya, secara rata-rata satu rumah tangga (asumsi empat orang anggota rumah tangga) di Kabupaten Wakatobi dikatakan miskin jika pendapatannya (yang didekati dengan pengeluaran) kurang dari Rp1.115.716,00 sebulan. Bila kenaikan garis kemiskinan Kabupaten Wakatobi di tahun



2019 dikaitkan dengan peningkatan jumlah penduduk di tahun yang sama, maka ini adalah sebuah *Good News* bahwa meningkatnya jumlah penduduk ini diiringi dengan kemampuan mereka untuk melewati garis kemiskinan atau standar hidup yang mencukupi di Sulawesi Tenggara.

Gambar 8.1 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Wakatobi (Rupiah), 2016-2019



Sumber : Susenas 2016-2019, Badan Pusat Statistik

Kinerja perekonomian Kabupaten Wakatobi sesungguhnya sudah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Dalam kurun waktu 2016-2019, tingkat kemiskinan di Kabupaten Wakatobi berangsur menurun, dimana penurunan tertinggi terjadi di tahun 2019. Pada tahun 2019 tercatat penduduk miskin di Kabupaten Wakatobi ada sebanyak 14,14 ribu jiwa atau sebesar 14,75 persen dari total penduduk Kabupaten Wakatobi, turun 0,1 persen jika dibandingkan tahun 2018.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di daerah perdesaan seperti Kabupaten Wakatobi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang mendukung. Program Dana Desa yang telah dijalankan oleh pemerintah sejak tahun 2015 juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa dan mengentaskan kemiskinan. Meskipun sudah 4 tahun berjalan, namun persentase penduduk miskin di Kabupaten Wakatobi masih jauh diatas persentase penduduk miskin di Indonesia secara umum. Kemungkinan masih tingginya angka kemiskinan di Wakatobi berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah perdesaan. Program Dana Desa tersebut rupanya belum mampu menekan angka



persentase kemiskinan di Kabupaten Wakatobi menuju angka satu digit. Selama ini, alokasi penggunaan dana desa di Kabupaten Wakatobi sebagian digunakan untuk pembangunan sipil, belum banyak diarahkan ke pengembangan dan pemberdayaan SDM serta program penciptaan lapangan kerja padahal lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah perdesaan terbatas. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk memanfaatkan Dana Desa secara optimal untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang nantinya akan mengurangi kemiskinan.

Tabel 8.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Wakatobi, 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	15,73	15,49	14,20	14,14
Persentase Penduduk Miskin (persen)	16,46	16,19	14,85	14,75

Sumber : Susenas 2016-2019, Badan Pusat Statistik

Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin (P_0). Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (P_1) dan keparahan (P_2) dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. P_1 adalah indeks yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2019, P_1 Kabupaten Wakatobi tercatat sebesar 2,19 atau cenderung turun bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,90. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P_1) ini dapat diartikan bahwa jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Artinya bahwa kemampuan penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan semakin tinggi. Meskipun garis kemiskinan terus meningkat, namun rata-rata pendapatan per kapita per bulan rumah tangga di Kabupaten Wakatobi (yang diproksi dengan pengeluaran per kapita per bulan rumah tangga) sebesar Rp782.715,00 masih jauh di atas garis kemiskinan.



Tabel 8.2 Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Wakatobi, 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	2,85	2,52	2,90	2,19
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)	0,76	0,59	0,74	0,58

Sumber : Susenas 2016-2019, Badan Pusat Statistik

Berbeda dengan P_1 , P_2 adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin. Sejalan dengan P_1 , P_2 Kabupaten Wakatobi di tahun 2019 juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. P_2 Kabupaten Wakatobi pada tahun 2019 tercatat sebesar 0,58, turun bila dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 0,74. Penurunan P_2 dapat diartikan sebagai penurunan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin rendah angka P_2 , semakin kecil pula kesenjangan ketimpangan yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan kehidupan ekonomi sebagian penduduk miskin di Kabupaten Wakatobi mengalami perbaikan.

Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Wakatobi di tahun 2019 menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wakatobi seharusnya cenderung lebih mudah dibanding tahun sebelumnya (dikarenakan nilai kedua indeks tersebut yang semakin kecil). Pemerintah perlu mengambil langkah konkret terkait perbaikan yang lebih berpihak kepada penduduk miskin yang nilai pengeluaran per kapita sebulannya masih jauh dari garis kemiskinan. Sementara itu, beberapa kelompok penduduk miskin masih menerima pendapatan yang cukup rendah sehingga tidak mampu mengangkat taraf ekonominya. Di saat yang sama, besaran pengeluaran yang dibutuhkan untuk keluar dari garis kemiskinan mengalami peningkatan. Namun ini tidak dialami oleh seluruh penduduk miskin, hanya sebagian saja.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. Utudae Samad No. 25, Wakatobi, 93795

Telp/Faks : (0404) 2222003

Homepage : <https://wakatobikab.bps.go.id>

E-mail : bps7407@bps.go.id

ISBN 978-602-6461-44-5

